



LAPORAN KINERJA

(LKj)

TAHUN 2024

DINAS PEKERJAAN UMUM

**PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan YME atas segala petunjuk dan bimbinganNya sehingga tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun dimaksudkan sebagai bahan informasi dan evaluasi serta tanggung jawab pelaksanaan kinerja untuk Tahun 2024.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 ini masih belum sempurna, oleh karena masukan baik berupa saran maupun kritik yang membangun untuk penyempurnaan sangat kami harapkan, dan semoga Laporan ini bermanfaat bagi semua pihak terutama untuk peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut di masa - masa mendatang..... Aamiin.

Pelaihari, 20 Januari 2025

Kepala Dinas,



SYAKHRIL HADRIANADI, ST

NIP. 19750412 199603 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Ketersediaan infrastruktur telah diyakini akan memegang peranan penting dalam perkembangan dan kemajuan suatu bangsa. Dengan hadirnya infrastruktur yang handal maka terwujudnya pemenuhan Hak Dasar Rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, kesehatan dan hak-hak lainnya akan terdukung lebih optimal.

Oleh karenanya, pembangunan infrastruktur selain perlu terus ditingkatkan, juga harus benar-benar dirancang dan diimplementasikan secara sistematis dengan matang sesuai kondisi dan potensi ekonomi dan sosial serta tingkat kebutuhan dan perkembangan suatu wilayah. Tentunya termasuk dalam hal ini adalah pembangunan infrastruktur pekerjaan umum penataan ruang dan pertanahan yang harus selaras dan bersinergi dengan sektor - sektor lainnya disamping adanya kebersamaan langkah antara Pemerintah dengan pemerintah daerah di dalam pelaksanaannya

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut tentang capaian kinerja, sasaran selama tahun 2024 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategik tahun 2024 - 2026 dan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2024.

Pada Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut melaksanakan **11 Program, 21 Kegiatan dan 74 Sub Kegiatan** dengan anggaran Belanja sebesar **Rp. 608.767.318.044,-** dengan realisasi **Rp. 564.565.364.070,-** atau sebesar **92,74 %** dan **Realisasi pendapatan Rp. 668,430,000,-** dari target **Rp. 500.000.000,-** atau sebesar **133,69 %**. Secara umum capaian kinerja sasaran tahun 2024 sudah cukup baik.

Demikian dengan disusunnya LKj ini dapat memberikan informasi dan manfaat serta evaluasi dalam pengambilan keputusan guna lebih mendorong peningkatan kinerja maupun kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Tanah Laut dimasa yang akan datang.

Pelaihari, 20 Januari 2025

Kepala Dinas,



SYAKHRIL HADRIANADI, ST
NIP. 19750412 199603 1 002

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah senantiasa menuntut adanya percepatan, terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta Pemerintah juga memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan *public goods and services* sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and services disebut governance (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut “good governance” (kepemerintahan yang baik). Agar “good governance” dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. Good Governance yang efektif menuntut adanya “alignment” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep good governance penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggung jawab managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya.

Dalam dunia pemerintahan akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat

penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka (LKj) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan (LKj) mengacu pada upaya dokumentasi dan evaluasi hasil kerja suatu lembaga atau unit pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Laporan ini dirancang untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut telah mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan.

Berikut beberapa maksud atau tujuan dari penyusunan (LKj) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut :

1. Akuntabilitas: Laporan kinerja membantu menciptakan tingkat akuntabilitas yang tinggi. Dengan menyajikan informasi terperinci tentang pencapaian tujuan, instansi pemerintah bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya publik.
2. Transparansi: Laporan kinerja dirancang untuk memberikan transparansi terhadap aktivitas dan pencapaian Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut. Ini memungkinkan masyarakat umum, pemangku kepentingan, dan lembaga pengawas untuk memahami bagaimana sumber daya publik digunakan.
3. Evaluasi Kinerja: Laporan ini memberikan landasan untuk mengevaluasi sejauh mana Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut telah mencapai sasaran dan target yang ditetapkan. Dengan menilai kinerja, instansi dapat mengidentifikasi keberhasilan, kelemahan, dan peluang untuk perbaikan.
4. Perencanaan dan Pengambilan Keputusan: Data yang terdapat dalam laporan kinerja dapat digunakan sebagai dasar untuk perencanaan masa depan dan pengambilan keputusan. Informasi tersebut membantu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dan efisien.
5. Pemantauan Program dan Proyek: Laporan kinerja juga berfungsi sebagai alat pemantauan terhadap program dan proyek yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut. Dengan melacak pencapaian target, instansi dapat memastikan bahwa program-program tersebut

berjalan sesuai dengan rencana.

6. Pertanggungjawaban kepada Pemangku Kepentingan: Laporan kinerja memberikan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum, dan pihak berkepentingan lainnya, gambaran yang jelas tentang kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut. Ini membantu membangun kepercayaan dan mendukung hubungan positif antara instansi dan pemangku kepentingan.

Dengan merinci pencapaian, tantangan, dan langkah-langkah perbaikan yang diambil, laporan kinerja membantu menciptakan lingkungan di mana pemerintah dapat bekerja lebih efektif dan akuntabel.

C. Dasar Hukum

Pelaksanaan penyusunan (LKj) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan (LKj), yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Cascading Kinerja

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut telah menerapkan cascading kinerja untuk membantu menciptakan hubungan yang jelas antara strategi organisasi dan tindakan harian individu atau unit. Hal ini dapat meningkatkan fokus, pengukuran kinerja yang terarah, dan akhirnya membantu organisasi mencapai tujuan strategisnya secara lebih efektif.

Cascading dalam bentuk Pohon Kinerja dimuat dalam Lampiran dari Lkj ini.

E. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, bahwa Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

- a. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan:
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Sumber Daya Air;
- d. Bidang Bina Marga;
- e. Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi;
- f. Bidang Tata Ruang terdiri;
- g. Bidang Pertanahan;
- h. UPT Dinas yaitu UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dan sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, disebutkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan serta tugas pembantuan yang diberika kepada daerah.

Sedangkan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas;
- e. pembinaan UPTD dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Secara lebih rinci uraian tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebagaimana Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut seperti uraian dibawah ini.

Uraian tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya air;
- e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang bina marga;
- f. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang cipta karya dan jasa konstruksi;
- g. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang tata ruang;
- h. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang pertanahan;
- i. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemberian perizinan, non perizinan / rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- j. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan;
- k. membina dan mengawasi pelaksanaan UPT Dinas; dan

- I. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Uraian tugas Sekretariat sebagai berikut:

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran dinas;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana strategis;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset dinas;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan hubungan masyarakat dan protokol;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Perencanaan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program Dinas;
- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran Dinas;
- d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, revisi anggaran;
- f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang pertanian;
- g. melaksanakan penyusunan laporan kinerja, LPPD, LKPJ dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- h. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Sub Bagian Keuangan sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
- b. melaksanakan penyusunan kegiatan rutin;
- c. melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- d. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- e. melaksanakan urusan gaji pegawai;
- f. melaksanakan administrasi keuangan;
- g. melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- h. melaksanakan penyusunan laporan keuangan, laporan dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;
- f. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- g. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
- h. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;

- i. melaksanakan telahan, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- k. melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- l. melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
- m. melaksanakan penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga;
- n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Bidang Sumber Daya Air sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang sumber daya air;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang sumber daya air dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan wilayah di bidang sumber daya air serta pemanfaatan dan sumber daya air, pengelolaan data dan pemeliharaan proyek-proyek dibidang air baku;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan penelitian /survey, Inventarisasi, penyusunan perencanaan teknis dan program pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan pengairan;
- e. menyusun program, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan pengembangan pembangunan bidang sumber daya air yang meliputi perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan;
- f. menyusun program, mengoordinasikan dan membina pelaksanaan pengawasan pengendalian pelaksanaan pembangunan, operasi serta pemeliharaan, pengamanan pengairan dan Daerah aliran sungai;
- g. menyusun program dan melaksanakan koordinasi penanggulangan bencana banjir dan bencana alam lainnya serta usaha-usaha pengendalian erosi di bidang teknik sipil;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan perizinan, pengamanan pemanfaatan air pada alur sungai dan garis sepadan pantai;

- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan teknologi perairan sedang dan kecil, sistem informasi dan monitoring jaringan Irigasi, pengembangan pembinaan serta pemberdayaan masyarakat petani pemakai air dan pengembangan kerjasama teknis maupun kemitraan dengan masyarakat Swasta, BUMN/ BUMD, pemerintah daerah dalam bidang lainnya;
- j. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan drainase serta mengadakan pengembangan daerah rawa, sungai, danau, dan bangunan pelengkap;
- k. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyuluhan dan pembinaan masyarakat serta mengatur pekerjaan pemakai dan pemanfaatan jaringan irigasi serta sumber – sumber air termasuk bendungan sedang atau kecil maupun danau – danau alam atau buatan, rawa dan pantai;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Uraian tugas Bidang Bina Marga sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang bina marga;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang bina marga dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. menyusun program kegiatan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan tehnik, penerapan dan pengembangan teknologi pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan kebinamargaan ;
- d. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengendalian uji mutu, analisa dampak lingkungan dalam pemanfaatan kebinamargaan;
- e. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan kebinamargaan ;
- f. menyusun program, membina, mengatur dan mengendalikan pengawasan dan pengendalian mutu pekerjaan bina marga;

- g. menyusun program, membina, mengatur dan mengendalikan peningkatan, pemeliharaan dan pengawasan jalan dan jembatan;
- h. menyusun program, membina, mengatur dan mengendalikan penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina marga; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Uraian tugas Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria
- c. bidang cipta karya dan jasa konstruksi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk pemberian perizinan/non perizinan/ rekomendasi Izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan gedung-gedung Pemerintah dan Rumah Dinas;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Uraian tugas Bidang Tata Ruang sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan rencana tata ruang daerah;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang tata ruang dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. merumuskan dan menentukan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana, perencanaan tata ruang serta penilaian atas pelaksanaannya;

- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana program penataan ruang;
- e. mengidentifikasi, mengolah dan menganalisa bahan rencana pembangunan bidang tata ruang;
- f. mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyajian data serta informasi Geografi Daerah;
- g. mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Daerah dan pengembangan kemitraan dalam mengelola tata ruang Daerah;
- h. mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan pola dasar, propeda, repetada bidang tata rang serta melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan tata ruang;
- i. mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- j. mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan RTRKSK;
- k. mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan RDTR Kabupaten;
- l. mengoordinasikan, membina dan mengendalikan Sinkronisasi program pembangunan dan penataan ruang Kabupaten;
- m. mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan ketentuan peraturan zonasi sistem Kabupaten;
- n. mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan perangkat insentif dan disinsentif tingkat Kabupaten;
- o. mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan Pemberianizin pemanfaatan ruang tingkat Kabupaten;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata ruang; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- r. bidang cipta karya dan jasa konstruksi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- s. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk pemberian perizinan/non perizinan/rekomendasi Izin mendirikan bangunan(IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;

- t. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya;
- u. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan Gedung-gedung Pemerintah dan Rumah Dinas;
- v. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi; dan
- w. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Uraian tugas Bidang Pertanahan sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang pertanahan;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pertanahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penetapan subjek dan objek pengaduan atas permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan perencanaan pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penguasaan, penggunaan tanah dan bangunan tanah;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyiapan data untuk menangani dan menyelesaikan sengketa tanah;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan bidang pertanahan kepada masyarakat;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan pengurusan hak atas tanah instansi pemerintah dan pengadaan tanah;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan pengurusan hak – hak atas tanah perseorangan dan badan hukum;
- j. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah;
- k. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penetapan subyek dan obyek ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*;
- l. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah kabupaten;

- m. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan inventarisasi tanah kosong;
- n. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pemanfaatan tanah kosong;
- o. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan proses penerbitan perizinan/ non perizinan / rekomendasi izin pembukaan tanah sesuai sistem dan prosedur yang berlaku;
- p. perumusan rencana penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten;
- q. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan toponimi;
- r. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanahan; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Sedang UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi menurut Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 109 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut sebagaimana uraian dibawah ini.

Susunan Organisasi UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi terdiri atas :

- a. UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

UPTD Peralatan dan Pengujian Material konstruksi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan operasional pengelolaan peralatan;
- b. pelaksanaan penyusunan program kerja di bidang pengelolaan peralatan yang disesuaikan dengan kebijakan dinas;
- c. penyelenggaraan pengelolaan dan pemeliharaan peralatan;
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan peralatan;
- e. penyusunan kebijakan operasional pengelolaan laboratorium pengujian material konstruksi;
- f. pelaksanaan penyusunan program kerja di bidang pengelolaan laboratorium pengujian material konstruksi yang disesuaikan dengan kebijakan dinas;
- g. pelaksanaan kegiatan pelayanan pengujian kelayakan bahan dan mutu Konstruksi;

- h. pengumpulan, pengembangan, penyajian dan pelayanan informasi pembangunan/perbaikan Konstruksi;
- i. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Sedangkan uraian tugas UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi sebagai berikut :

- a. menyusun kebijakan operasional pengelolaan peralatan dan laboratorium pengujian material konstruksi;
- b. menetapkan perencanaan kinerja UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi berdasarkan Renstra/Renja Dinas;
- c. melaksanakan kebijakan umum dan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang peralatan dan pengujian material konstruksi sesuai dengan kebijakan Dinas dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi;
- e. melaksanakan perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan peralatan berdasarkan standar operasional yang telah ditetapkan;
- f. menghimpun dan mengolah data serta informasi
- g. yang berhubungan dengan UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan unit lain/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengelolaan, perawatan, dan pemeliharaan peralatan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan pengujian material konstruksi dan informasi konstruksi;
- k. menyusun jadwal pemakaian peralatan untuk ketertiban operasionalnya;
- l. menghimpun dan mengolah data pelaksanaan pemakaian peralatan;
- m. menyiapkan bahan dan membuat laporan penerimaan dan retribusi pemakaian peralatan dan laboratorium pengujian material konstruksi;

- n. melaksanakan inventarisasi kebutuhan, usulan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana peralatan dan Laboratorium Pengujian Material Konstruksi pada wilayah UPTD;
- o. melaksanakan pembinaan teknis dan melaksanakan fasilitasi penggunaan teknologi dalam pemeriksaan laboratoris;
- p. melaksanakan kegiatan pelayanan pengujian kelayakan bahan dan mutu konstruksi;
- q. melaksanakan pengumpulan, pengembangan, penyajian dan pelayanan informasi pembangunan/ perbaikan konstruksi;
- r. melaksanakan penanganan pengaduan hasil pengujian;
- s. melaksanakan pembinaan pengelolaan urusan ketatausahaan;
- t. mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi;
- u. melaksanakan pelayanan masyarakat berupa sewa ataupun peminjaman peralatan dan jasa perbengkelan;
- v. melaksanakan kerja sama peralatan maupun perbengkelan dalam optimalisasi pelayanan masyarakat; dan
- w. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan kegiatan UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi;
- b. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data pelaksanaan kegiatan UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kerja Anggaran dan melaksanakan pengelolaan penatausahaan keuangan;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- e. mengelola surat-menyurat, ekspedisi, dan kearsipan;
- f. menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga dan kehumasan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan perlengkapan;
- h. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- i. melaksanakan urusan organisasi, ketatalaksanaan dan perpustakaan;
- j. menyusun laporan kinerja dan laporan sejenis sesuai tugas dan fungsinya;

- k. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- l. melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- m. melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan, dan pemindahan barang;
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Tata Usaha; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

F. Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan capaian kinerja selama kurun waktu 2024-2026, dapat digambarkan isu-isu strategis dan permasalahan yang mendesak dan harus diselesaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas infrastruktur dasar (jalan dan jembatan yang berkualitas)
- Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar sumber daya air.
- Penanggulangan potensi bencana banjir, kekeringan, gelombang pasang, dan abrasi pantai.
- Peningkatan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar pemukiman yang mencakup air minum dan sanitasi
- Peningkatan kesesuaian ruang yang sesuai dengan RTRW
- Penanggulangan Konflik Pertanahan dan peningkatan konsolidasi tanah.

Di samping permasalahan tersebut di atas, terdapat juga permasalahan pelayanan SKPD dalam pemenuhan SPM di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:

1. Kurangnya sumber daya manusia terutama tenaga teknis;
2. Kurangnya pengetahuan dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas umum;
3. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait.

Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah :

1. Meningkatkan dan menambah kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur khususnya tenaga teknis;
2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap arti pentingnya fasilitas umum;
3. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait
4. Meningkatkan kemantapan jalankabupaten;
5. Meningkatkan ketersediaan air irigasi;
6. Meningkatkan cakupan layanan air minum dan sanitasi permukiman;
7. Meningkatkan ketersediaan informasi penataan ruang;
8. Meningkatkan implementasi SPIP;
9. Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi.

G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran

1. Dukungan SDM

Sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan penentu yang sangat penting bagi keefektifan berjalannya kegiatan di dalam organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi. Pada tahun 2024, pegawai Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut berjumlah 157 orang, yang terdiri dari 63 orang PNS (Pegawai Negeri Sipil), 4 Orang PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), 75 orang PTT (Pegawai Tidak Tetap) dan 15 orang TTK (Tenaga Teknis Kontrak).

Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut berjumlah 65 orang yang jika dikelompokkan berdasarkan posisi kualifikasi pendidikan, golongan, jenis kelamin dan status jabatan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Jumlah PNS Dinas PUPRP Tahun 2024 Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Jabatan	Pendidikan							
		SMP	SLTA	D II	D III	D IV	S I	S II	S III
1	Kepala Dinas						1		
2	Sekretaris Dinas						1		
3	Kepala Bidang					1	1	2	1
4	Kasi/Kasubbag						2	3	
5	JFU	2	14	1	12	1	11		2
6	JFT						3	4	1
7	PPPK						4		
Jumlah		2	14	1	12	2	23	9	4
		67							

Dari tabel diatas dapatlah dikatakan bahwa ASN Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut yang kualifikasi pendidikan S I sebanyak 23 orang, S II sebanyak 9 orang, D IV sebanyak 2 orang, D III sebanyak 12 orang, D II sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 14 orang dan SMP sebanyak 2 orang.

Diharapkan yang mereka yang berpendidikan D3 dapat melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu dengan memberi kesempatan kepada mereka melalui ijin belajar maupun tugas belajar. Begitu juga yang berpendidikan dibawah D3

memungkinkan kepada mereka untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Adapun Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2024 berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2.
Jumlah PNS Dinas PUPRP Tahun 2024 Berdasarkan Golongan

No	Jabatan	Golongan												9	JLH	
		I		II				III				IV				
		d	a	b	c	d	A	b	C	d	a	b	c			
1	Kepala Dinas											1			1	
2	Sekretaris Dinas											1			1	
3	Kepala Bidang							1	2	2					5	
4	Kasi/Kasubbag							1	3	1					5	
5	JFU		1	2	3	7	16	8	5		1				43	
6	JFT							1	4	3					8	
7	PPPK													4	4	
Jumlah			1	2	3	7	16	9	11	8	4	2		4	67	
			13				44				6			4	67	

Dari tabel diatas dapatlah dikatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2024 yang memiliki Golongan IV sebanyak 6 orang, Golongan III sebanyak 44 orang, Golongan II sebanyak 14 orang dan Golongan IX atau PPPK sebanyak 1 orang.

Sedangkan menurut jenis kelamin Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.3.
Jumlah PNS Dinas PUPRP Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Kepala Dinas	1	-
2	Sekretaris Dinas	1	-
3	Kepala Bidang	5	-
4	Kasi/Kasubbag	3	2
5	JFU	33	10
6	JFT	7	1
7	PPPK	3	1
Jumlah		53	14

67

Dari tabel diatas dapatlah dikatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2024 yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 53 orang dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 14 orang.

Sumber daya manusia Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, selain dari Pegawai Negeri Sipil juga dibantu oleh Pegawai Tidak Tetap yaitu sebanyak 75 orang dan Tenaga Teknis Kontrak sebanyak 15 orang. Keadaan Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Teknis Kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan berdasarkan kualifikasi pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini :

Tabel 1.4.
Jumlah PTT dan TTK Dinas PUPRP Tahun 2024 Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Jabatan	Pendidikan						Jumlah
		SD	SMP	SLTA	DIII	DIV	SI	
1	PTT	4	5	30	12	1	23	75
2	TTK			5	3		8	15
	Total seluruhnya	90						

Dari tabel di atas dapatlah dijelaskan bahwa kualifikasi pendidikan Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Teknis Kontrak Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan lebih banyak berpendidikan SLTA sebanyak 30 orang, yang berpendidikan S1 sebanyak 23 orang , yang berpendidikan DIV sebanyak 1 orang, yang berpendidikan DIII sebanyak 15 orang dan sisanya berpendidikan SD dan SMP masing-masing sebanyak 9 orang.

Sedangkan jumlah Pegawai Tidak Tetap Tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.5.
Jumlah PTT Dinas PUPRP Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Jenis Kelamin	
		LK	PR
1	PTT	55	20
2	TTK	10	5
	Jumlah	90	

2. Sarana Prasarana

Jumlah dukungan sarana dan prasarana berupa 2 unit gedung kantor, 38 kendaraan dinas operasional (sepeda motor), 7 buah mobil dinas operasional dan 1 buah mobil jabatan.

3. Anggaran

Pada Anggaran Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan terdapat **11 Program, 21 Kegiatan dan 74 Sub Kegiatan** dengan anggaran sebesar **Rp. 608.767.318.044,-** (Enam Ratus Delapan Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah Empat Puluh Empat Rupiah), yang terbagi dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan masing – masing unit kerja (bidang, sekretariat dan unit pelaksana teknis) yang bisa dapat pada tabel berikut :

Tabel 1.6
Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3
A	SEKRETARIAT	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17,359,891,939
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	469,998,249
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29,999,164.
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	439,999,085
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,625,358,686
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,515,359,600

4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	109,999,086
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	233,844,406
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	233,844,406
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	335,550,000
6	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	111,550,000
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	224,000,000
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,092,874,252
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17,998,835
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	932,742,117
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22,461,978
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	54,976,172
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,000,000
13	Penyediaan Bahan/Material	10,000,000.00
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,049,500,000
15	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1,995,150
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	291,368,054
16	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66,600,000
17	Pengadaan Mebel	224,768,054
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,183,942,092
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	418,000,000
19	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,765,942,092
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	337,156,200
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14,959,200
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18,057,500
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49,783,500
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	88,356,000
B	SUMBER DAYA AIR	
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	119,048,200,460

1	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	92,413,585,517
26	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	0
19	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	631,696,256.
20	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	3,399,958,713
21	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampungan Air Lainnya	0
22	Normalisasi/Restorasi Sungai	16,903,061,147
23	Pembangunan Breakwater	5,099,991,369
24	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	15,698,718,699
25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	999,952,693
26	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	11,499,674,390
27	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	28,292,917,230
28	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	1,000
29	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Kontruksi Pengendali Banjir, Lahar dan Pengaman Pantai	2,750,000,000
30	Pembangunan Embung dan Penempungan Air Lainnya	2,867,740,312
31	Rehabilitasi Tanggul Sungai	3,119,872,708
32	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Kontruksi Air Tanah dan Air Baku	1,000
33	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Kontruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampungan Air Lainnya	1,150,000,000
2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	26,634,814,943
34	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	3,035,878,515
35	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	3,099,664,819
36	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	0
37	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	0
38	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	14,949,440,144
39	Operasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	999,920,293
40	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Irigasi	0
41	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	2,099,974,262
42	Operasi Kelembagaan Pengelolaan Irigasi	249,737,110
43	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Kontruksi Irigasi Rawa	2,199,999,800
C	BIDANG CIPTA KARYA DAN JASA KONSTRUKSI	
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	28,176,685,087
1	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	28,176,685,087
44	Penyusunan Rencana, Kebijakan Strategis dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1,096,772,726
45	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	5,298,386,363

46	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM Jaringan Perpipaan	12,414,466,000
47	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	9,367,059,998
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	7,278,118,000
2	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	7,278,118,000
48	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD)	7,278,118,000
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	23,811,288,625
3	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	23,811,288,625
49	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	22,913,000,000
50	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	898,288,625
4	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	144,897,085,041
4	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	144,897,085,041
51	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	144,897,085,041
5	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	300,000,000
5	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	300,000,000
52	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	300,000,000
D	BINA MARGA	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	256,735,133,618
1	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan	256,735,133,618
53	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	6,799,999,999
54	Penggantian Jembatan	19,099,999,556
55	Pembangunan jalan	36,755,0174,399
56	Rekonstruksi jalan	48,934,068,100
57	Pelebaran Jalan Meju Standar	3,498,903,404
58	Pemeliharaan Rutin Jembatan	11,999,631,742
59	Rehabilitasi Jembatan	5,099,999,998
60	Pembangunan Jembatan	31,099,999,517
61	Rehabilitasi Jalan	75,949,499,964
62	Pemeliharaan Rutin Jalan	17,498,016,939
E	BIDANG TATA RUANG	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3,491,729,101

1	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	3,491,729,101
48	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	799,632,544
49	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	127,236,180
2	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	2,469,340,377
50	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	204,558,000
51	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	2,264,782,377
3	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	95,520,000
52	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	95,520,000
F	BIDANG PERTANAHAN	
1	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	1,347,165,868
1	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,347,165,868
53	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	651,481,306
54	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	695,684,562
1	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	627,730,792
1	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	627,730,792
55	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	627,730,792
G	UPTD PERALATAN DAN PENGUJIAN MATERIAL KONSTRUKSI	5,694,289,513
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,490,500
1	Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah	9,490,500
56	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	9,490,500
2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	789.915,073
57	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9,963,433
58	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14,991,523
59	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9,965,864
60	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9,999,531
61	Penyediaan Bahan/Material	110,963,222
62	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	634,031,500
3	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16,167,200.00
63	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4,762

64	Pengadaan Alat Besar	2,200,600,020
65	Pengadaan Mebel	9,990,000
66	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15,263,637
67	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	169,761,381
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	499,264,140
68	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	132,000,000
69	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	199,981,200
70	Pemeliharaan Mebel	1,000,000
71	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	119,270,000
72	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47,012,940

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya

Seluruh rekomendasi hasil evaluasi Sakip tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti dan diunggah dalam website Sakuntala sebagaimana matrik/ tabel berikut :

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN
A.	Perencanaan Kinerja			
	Dokumen perencanaan kinerja agar dipublikasikan pada Website resmi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan atau pada Website PPID Kabupaten Tanah Laut	Website/ Aplikasi masih dalam proses Pengadaan/ Pembuatan oleh Konsultan	Website DPUPRP	Dalam Progres Pembuatan Sistem Informasi Smart Office DPUPRP
	Dalam menyusun perencanaan kinerja agar senantiasa menyajikan hubungan kinerja, strategi, kebijakan, dan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting)	perencanaan kinerja telah senantiasa menyajikan hubungan kinerja, strategi, kebijakan, dan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting)	Crosscutting Pohon Kinerja	Perencanaan kinerja telah menyajikan hubungan kinerja, strategi, kebijakan, dan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting)

I. Sistematika Penyajian

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan singkat tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, cascading kinerja, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, isu strategis, dukungan SDM, sarana prasarana dan anggaran, tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun sebelumnya serta sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan visi RPJMD, misi RPJMD, tujuan dan sasaran sasaran strategis, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja serta program dan kegiatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan akuntabilitas kinerja organisasi yang berisi sasaran RPJMD, capaian indikator kinerja utama/eselon 2, capaian kinerja Eselon 3, capaian kinerja Eselon 4 pada Sekretariat dan UPT serta akuntabilitas keuangan yang berisi anggaran dan realisasi APBD, anggaran dan realisasi menurut sasaran dan program, perbandingan program dan kegiatan dengan tahun sebelumnya.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dan strategi peningkatan kinerja.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Tujuan Sasaran Daerah

Tujuan merupakan gambaran suatu kondisi yang akan dicapai pada akhir suatu periode pembangunan, sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yang menggambarkan kondisi maupun hasil pembangunan yang lebih spesifik dan sangat berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi dengan menggunakan seperangkat indikator kuantitatif yang relevan. Indikator-indikator tersebut ditetapkan dengan maksud agar proses dan pelaksanaan program prioritas dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Perumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, namun pada periode ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merumuskan sebuah konsep Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026
3. Misi RPJPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025
4. Isu-isu strategis Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.

Dari hasil perbandingan muatan konsideran tersebut, teridentifikasi tiga aspek yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode selanjutnya. Ketiga aspek tersebut yaitu: Pembangunan manusia, pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan pembangunan Tata

Kelola Pemerintahan.

Aspek Pembangunan Manusia adalah dimensi perencanaan yang berkaitan dengan meningkatkan kualitas hidup manusia Kabupaten Tanah Laut. Aspek pembangunan Ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan merupakan aspek dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kegiatan yang bernilai ekonomi serta memberikan layanan-layanan pemenuhan infrastuktur yang berwawasan lingkungan. Sedangkan aspek pembangunan Tata Kelola Pemerintahan adalah aspek yang fokus kepada kualitas tata kelola pemerintah sebagai pihak yang memfasilitasi hak-hak masyarakat dan menjamin akses serta kolaborasi pembangunan yang inklusif. Ketiga aspek ini selanjutnya menjadi dasar perumusan konsep Rencana Pembangunan Daerah yang kemudian diturunkan menjadi rangkaian rumusan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026. Selengkapnya proses perumusan konsep RPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Sandingan Dokumen Konsideran dan Isu Strategis dalam Perumusan Konsep Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026

AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN TAHUN 2020 - 2024	MISI RPJMD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021-2026	MISI RPJPD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2005-2025	ISU STRATEGIS KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024-2026	RPD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024-2026
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing • Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berbudi pekerti luhur 	<ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 	<ul style="list-style-type: none"> • Akseibilitas Pendidikan dan Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan • Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan • Memperkuat infrastruktur dan mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar • Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata • memperkuat sarana prasarana dasar dan perekonomian • meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bertumpu pada pengembangan industri berbasis pertanian, kelautan, pertambangan, dan pariwisata • Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang Berwawasan lingkungan dan Berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan investasi • infrastruktur Dasar dan Lingkungan Hidup yang berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Ekonomi Masyarakat Secara merata dengan pembangunan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan
<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan penegakan supremasi hukum dan ketertiban serta penerapan sistem otonomi daerah dengan tata kelola pemerintahan yang baik 	<ul style="list-style-type: none"> • Reformasi Birokrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Sumber: RPJMN 2020-2024, RPJMD Prov. Kalimantan Selatan 2021-2026, RPJPD Kabupaten Tanah Laut 2005-2025, Diolah 2023

Adapun Konsep RPD Tahun 2024-2026 adalah “Tanah Laut Berdaya Saing”. Makna dari “Berdaya saing” mengandung arti suatu kemampuan dan kemapanan terhadap tatanan dasar masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang memiliki keunggulan kompetitif untuk menghadapi persaingan global dimasa yang akan datang. Tatanan dasar tersebut mencakup sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang berkualitas, perekonomian yang inklusif (merata) dan iklim usaha (investasi) yang kondusif, dan pemerintahan daerah yang profesional dan bersih.

Berdasarkan konsep RPD tersebut masing-masing aspek kemudian dielaborasi menjadi 3 tujuan dengan 19 sasaran turunannya. Adapun masing-masing sasaran diformulasikan dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang memiliki keterkaitan antar bidang urusan (*cross cutting issue*). Penjabaran tujuan dan sasaran tersebut selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	DATA AWAL		TARGET			KONDISI AKHIR
				2022 (REALISASI)	2023 (PROYEKSI)	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas		IPM	70,35	70,4 - 70,72	70,80	71	71,30	71,30
	1.1	Meningkatnya layanan dan aksesibilitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	12,32	12,35	12,37	12,39	12,4	12,4
			Angka Rata-Rata Lama Sekolah	7,90	7,95	8,05	8,15	8,25	8,25
	1.2	Meningkatnya layanan dan aksesibilitas Kesehatan	Angka Harapan Hidup	69,86	69,94	69,96	69,98	70,00	70,00
	1.3	Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga	Persentase pemuda berprestasi	22,22	30	40	45	50	50
			Persentase atlet berprestasi	86,97	85	85	90	95	95
	1.4	Meningkatnya peran perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	87,28	87,30	87,32	87,34	87,36	87,36
2	Peningkatan Ekonomi Masyarakat Secara merata dengan pembangunan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan		Pertumbuhan Ekonomi	5,12	4,5 - 5,0	4,6 - 5,0	4,7 - 5,0	4,8 - 5,0	4,8 - 5,0
			Gini Ratio	0,263	0,230	0,229	0,228	0,227	0,227
			Angka Kemiskinan	3,86	3,55	3,45	3,35	3,30	3,30
	2.1	Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	2,70	3,80	2,85	2,9	2,95	2,95
	2.2	Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	3,86	3,48	3,52	3,55	3,58	3,58
	2.3	Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	7,10	4,81	4,9	4,95	5,0	5,0
	2.4	Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Pariwisata	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata (akomodasi dan Makan Minum)	6,54	12,10	11,75	11,70	11,70	11,70
	2.5	Meningkatnya investasi daerah	Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah	83,91	5	5	5	5	5

NO	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	DATA AWAL		TARGET			KONDISI AKHIR
				2022 (REALISASI)	2023 (PROYEKSI)	2024	2025	2026	
2.6	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas		Indeks Infrastruktur	43,64	47,11	47,91	54,21	60,49	60,49
2.7	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana		IKLH	67,78	68,47	68,57	68,67	68,77	68,77
			Indeks Resiko Bencana	156,33	153,2	150,1	147	144	144
2.8	Meningkatnya kemandirian PPKS		Persentase PPKS yang Mandiri	13,32	15	17,5	20	22,5	22,5
2.9	Meningkatnya ketahanan pangan		Indeks Ketahanan Pangan	82,06	82,3	82,6	82,8	83	83
2.10	Menurunnya tingkat pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,17	3,55	3,45	3,35	3,30	3,30
2.11	Meningkatnya status kemajuan dan kemandirian desa		Nilai Rata-rata Indeks Desa Membangun	0.707	0,73	0,74	0,75	0,76	0,76
3	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)		Indeks Reformasi Birokrasi	60,19 (Baik)	61	62	63	65	65
3.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai SAKIP Kabupaten	67.28 (B)	69.00 (B)	70.01 (BB)	75.00 (B)	80.01 (A)	80.01 (A)
3.2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	49,38 (SPP)	61 (PB)	66 (PB)	71 (PB)	76 (Baik)	76 (Baik)
3.3	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Pemerintah		Indeks Pelayanan Publik	4,53 / A	4,53 / A	4,54 / A	4,55 / A	4,57 / A	4,57 / A
3.4	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks SPBE	3,11	3,15	3,2	3,4	3,6	3,6

PENYELARASAN INDIKATOR MAKRO

Sebagai salah satu amanat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 memperhatikan penyelarasan target indikator makro pada RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026. Berikut penyelarasan indikator makro tersebut.

Tabel 2.3 Penyelarasan Target Indikator Makro Nasional, Provinsi Kalsel, dan Kab. Tanah Laut

Indikator Makro Pembangunan	RPJMN 2020 - 2024	RPJMD Kalsel 2021-2026			RPD Tanah Laut 2024-2026		
	2024	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,2 – 6,5	5,2 - 6,0	6,0 - 6,24	6,24 - 6,5	4,6 - 5,0	4,7 - 5,0	4,8 - 5,0
Persentase Penduduk miskin (%)	6,0 – 7,0	4,40 - 4,22	4,22 - 4,05	4,05 - 3,77	3,45	3,35	3,30
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,6 – 4,3	4,05	3,88	3,71	3,45	3,35	3,30
Indeks Pembangunan Manusia	75,54	72,65	73,05	73,50	70,80	71,00	71,30
Gini Ratio	0,360 – 0,374	0,324	0,322	0,310	0,229	0,228	0,227

Sumber: RPJMN 2020-2024, RPJMD Prov. Kalimantan Selatan 2021-2025

A. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 - 2026 juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Kabupaten Tanah Laut untuk periode tersebut. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.

Adapun yang tujuan dan sasaran yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten

Tanah Laut yaitu pada Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 - 2026 dengan 2 (dua) tujuan yang dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Tujuan dan Sasaran Yang Diampu Dinas PUPRP Pada RPD Kab. Tanah Laut Tahun 2024 - 2026

NO	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR
2	Peningkatan Ekonomi Masyarakat Secara merata dengan pembangunan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan		Pertumbuhan Ekonomi
			Gini Ratio
			Angka Kemiskinan
2.6	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas		Indeks Infrastruktur
3	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)		Indeks Reformasi Birokrasi
	3.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	

Berdasarkan tujuan dan sasaran diatas, maka kemudian dikembangkan dan menjadi tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.5
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas	Indeks Infrastruktur	1 Meningkatkan infrastruktur jalan yang berkualitas	1 Persentase Jalan dalam kondisi mantap

			2	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air yang berkualitas dan berfungsi dengan baik	1	Luasan lahan yang teraliri irigasi dengan baik
					2	Persentase luasan genangan/banjir
			3	Meningkatnya rumah tangga dengan akses air minum layak dan sanitasi layak	1	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak
					2	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak
			4	Meningkatnya pemanfaatan tanah daerah.	1	Persentase aset tanah pemda yang termanfaatkan dengan baik
			5	Meningkatnya penataan bangunan gedung kantor pemerintah	1	Persentase bangunan gedung kantor pemerintah yang tertata dengan baik
6	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW			
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	7	Meningkatnya kinerja tata kelola Perangkat daerah yang akuntabel	1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Sedangkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.6
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target			Penanggung Jawab		
					2024	2025	2026			
1	Meningkatnya pembangunan infrastuktur yang berkualitas	1	Meningkatnya infrastruktur jalan yang berkualitas	1	Persentase Jalan dalam kondisi mantap	Persen	57	59	61	Kepala Dinas
		2	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air yang berkualitas dan berfungsi dengan baik	1	Luasan lahan yang teraliri irigasi dengan baik	Hektar	12446.383	12796.443	13065.990	
				2	Persentase luasan genangan/banjir	Persen	84.20	82.20	80.50	
		3	Meningkatnya rumah tangga dengan akses air minum layak dan sanitasi layak	1	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	Persen	3	4	4	
				2	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	Persen	3	4	4	
		4	Meningkatnya pemanfaatan tanah daerah.	1	Persentase aset tanah pemda yang termanfaatkan dengan baik	Persen	50	51	51	
		5	Meningkatnya penataan bangunan gedung kantor pemerintah	1	Persentase bangunan gedung kantor pemerintah yang tertata dengan baik	Persen	80	80	80	
6	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	Persen	85.47	90	95			
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	7	Meningkatnya kinerja tata kelola Perangkat daerah yang akuntabel	1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80	81	82	

B. Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 195 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, bahwa Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.7
Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

No.	Kinerja Utama/ Outcome/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggungjawab/ Sumber Data
1	Meningkatnya infrastruktur jalan yang berkualitas	1 Persentase Jalan dalam kondisi mantap	$\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi mantap}}{\text{Total panjang jalan di Kab.Tanah Laut}} \times 100 \%$	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
2	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air yang berkualitas dan berfungsi dengan baik	1 Luasan lahan yang teraliri irigasi dengan baik	Luas fungsional dalam kondisi buruk - luas fungsional	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		2 Persentase luasan genangan/banjir	$\frac{\text{Luas genangan yang belum terlindungi daya rusak air}}{\text{Luas rawan banjir}} \times 100 \%$	
3	Meningkatnya rumah tangga dengan akses air minum layak dan sanitasi layak	1 Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang meakses air minum layak}}{\text{Total rumah tangga}} \times 100 \%$	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

				Jumlah rumah tangga di Kab.Tanah Laut	
		2	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang meakses sanitasi layak}}{\text{Jumlah rumah tangga di Kab.Tanah Laut}} \times 100 \%$	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
4	Meningkatnya penataan bangunan gedung kantor pemerintah	1	Persentase bangunan gedung kantor pemerintah yang tertata dengan baik	$\frac{\text{Jumlah bangunan pemerintah yang terbangun dan tertata}}{\text{Jumlah bangunan pemerintah}} \times 100 \%$	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
5	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	$\frac{\text{Jumlah pertimbangan teknis yang dibuat}}{\text{Jumlah pertimbangan teknis}} \times 100 \%$	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
6	Meningkatnya pemanfaatan tanah daerah	1	Persentase aset tanah pemda yang termanfaatkan dengan baik	$\frac{\text{Jumlah aset tanah pemda yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah aset tanah pemda}} \times 100 \%$	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan/ BPKAD

Indikator Kinerja Utama Eselon 3 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Tabel 2.8
Indikator Kinerja Utama Eselon 3 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan	IKM Sekretariat Dinas PUPRP	Sekretariat
2	Meningkatnya kualitas perencanaan	Nilai komponen perencanaan	
3	Meningkatnya kualitas pelaporan	Nilai komponen pelaporan	
4	Meningkatnya kualitas evaluasi internal	Nilai komponen evaluasi internal	
5	Meningkatnya kualitas pengukuran	Nilai komponen pengukuran	
6	Menurunnya Kerusakan Jalan	Panjang Jalan Rusak	Bina Marga
7	Meningkatnya konstruksi jalan dan jembatan yang sesuai kebutuhan	Persentase panjang jalan yang memiliki konstruksi sesuai design	
8	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Sumber Daya Air
9	Terkendalnya daya rusak air pada DAS dan pantai	Persentase DAS dalam kondisi baik	
10	Terkendalnya daya rusak air pada DAS dan pantai	Persentase panjang pantai yang terlindungi	
11	Meningkatnya kualitas layanan SPAM rumah tangga	Persentase RT yang terlayani SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipaan dengan baik	Cipta Karya dan Jasa Konstruksi
12	Meningkatnya kualitas pengelolaan limbah	Persentase limbah yang terkelola dengan baik	
13	Meningkatnya sarana penunjang jalan	Persentase drainase jalan dalam kondisi baik	
14	Meningkatnya kualitas konstruksi bangunan gedung kantor pemerintah	Persentase konstruksi Bangunan gedung kantor pemerintah dalam kondisi baik	
15	Meningkatnya kualitas jasa konstruksi	Persentase jasa konstruksi yang tertib	
16	Meningkatnya Ketaatan pembangunan wilayah	Persentase pembangunan yang sesuai dengan RTR yang telah ditetapkan	Tata Ruang
17	Meningkatnya ketertiban tanah pemda	Persentase aset tanah pemda yang tertib (Crosscutting dengan BPKAD)	Pertanahan
18	Meningkatnya penyelesaian konflik tanah	Persentase konflik tanah yang terfasilitasi	

Indikator Kinerja Utama Eselon 4 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 2.9
Indikator Kinerja Utama Eselon 4 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab
1	Terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan DPUPRP	Jumlah Dokumen Perencanaan DPUPRP	Sub Bagian Perencanaan
2	Terlaksananya penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja DPUPRP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja DPUPRP	
3	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Bagian Keuangan
4	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
5	Terlaksananya Penyediaan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
6	Terlaksananya Diklat Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	
7	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	
8	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	
9	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	
10	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	
11	Terlaksananya Penyediaan Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	
12	Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket/Bahan Material Yang Disediakan	
13	Terlaksananya Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
14	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	

15	Terlaksananya Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang disediakan		
16	Terlaksananya Penyediaan Paket Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan		
17	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		
18	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		
19	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		
20	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
21	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
22	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		
23	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang dipelihara/direhabilitasi		
24	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan yang dipelihara/direhabilitasi		
25	Meningkatnya retribusi jasa sewa alat dan pengujian material konstruksi	Jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat uji material konstruksi		Kepala UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi
		Jumlah Penerimaan retribusi atas jasa sewa alat berat		
26	Melakukan Pemenuhan Sarana dan Prasarana UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi	Jumlah alat berat yang dipenuhi		
		Jumlah alat material konstruksi yang dipenuhi		
27	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi	Jumlah alat uji material konstruksi yang dipelihara dan berfungsi dengan baik		Sub Bagian TU UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi
28	Melakukan pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya		
29	Melakukan pelayanan administrasi UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi	Jumlah fasilitas pelayanan administrasi UPTD Peralatan dan Pengujian		

		Material Konstruksi	
30	Melakukan fasilitas peningkatan SDM UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi	Jumlah SDM UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi	

C. Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Eselon 2 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 2.10
Perjanjian Kinerja Eselon 2 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

NO	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya infrastruktur jalan yang berkualitas		
	1 Persentase Jalan dalam kondisi mantap	%	57
2	Meningkatnya kinerja tata kelola Perangkat daerah yang akuntabel		
	1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80
3	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air yang berkualitas dan berfungsi dengan baik		
	1 Luasan lahan yang teraliri irigasi dengan baik	Hektar	12446.383
	1 Persentase luasan genangan/banjir	%	84.20
4	Meningkatnya rumah tangga dengan akses air minum layak dan sanitasi layak		
	1 Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	%	3
	1 Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	3
5	Meningkatnya pemanfaatan tanah daerah.		
	1 Persentase aset tanah pemda yang termanfaatkan dengan baik	%	50
6	Meningkatnya penataan bangunan gedung kantor pemerintah		
	1 Persentase bangunan gedung kantor pemerintah yang tertata dengan baik	%	80
7	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang		
	1 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	%	85.47

Perjanjian Kinerja Eselon 3 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Tabel 2.11
Perjanjian Kinerja Eselon 3 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

1. Sekretaris

NO	SASARAN PROGRAM / PROGRAM / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan		
2	Meningkatnya kualitas perencanaan		
3	Meningkatnya kualitas pelaporan		
4	Meningkatnya kualitas evaluasi internal		
5	Meningkatnya kualitas pengukuran		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
1	IKM Sekretariat Dinas PUPRP	Nilai	80
2	Nilai Komponen Perencanaan	Nilai	30
3	Nilai Komponen Pelaporan	Nilai	30
4	Nilai Komponen Evaluasi Internal	Nilai	15
5	Nilai Komponen Pengukuran	Nilai	25

2. Kepala Bidang Bidang Marga

NO	SASARAN PROGRAM / PROGRAM / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Menurunnya Kerusakan Jalan		
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		
1	Panjang Jalan Rusak	KM	475
2	Persentase panjang jalan yang memiliki konstruksi sesuai design	%	100

3. Kepala Bidang Sumber Daya Air

NO	SASARAN PROGRAM / PROGRAM / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
1	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air yang berkualitas dan terkelola dengan baik			
	1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		
	1	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	71.11
	2	Persentase DAS dalam kondisi baik	%	15.80
	3	Persentase panjang pantai yang terlindungi	%	48.18

4. Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi

NO	SASARAN PROGRAM / PROGRAM / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
1	Meningkatnya rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih			
	1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		
	1	Jumlah RT yang terlayani SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipaan dengan baik	%	3
2	Meningkatnya rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi			
	2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		
	1	Persentase limbah yang terkelola dengan baik	%	3
3	Meningkatnya saluran drainase yang terbangun			
	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		
	1	Persentase drainase jalan dalam kondisi baik	%	7.37
4	Meningkatnya penataan bangunan gedung			
	4	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		
	1	Persentase konstruksi Bangunan gedung kantor pemerintah dalam kondisi baik	%	80
5	Meningkatnya kualitas jasa konstruksi			
	5	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		
	1	Persentase jasa konstruksi yang tertib	%	100

5. Kepala Bidang Tata Ruang

NO	SASARAN PROGRAM / PROGRAM / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Ketaatan pembangunan wilayah		
	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
	1	Persentase pembangunan yang sesuai dengan RTR yang telah ditetapkan	% 85.47

6. Kepala Bidang Pertanahan

NO	SASARAN PROGRAM / PROGRAM / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya penyelesaian konflik tanah		
	1	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	
	1	Persentase konflik tanah yang terfasilitasi	% 100
2	Meningkatnya ketertiban tanah pemda		
	2	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	
	1	Persentase aset tanah pemda yang tertib (Crosscutting dengan BPKAD)	% 50

Perjanjian Kinerja Eselon 4 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 2.12
Perjanjian Kinerja Eselon 4 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
1	Terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan DPUPRP	Jumlah Dokumen Perencanaan DPUPRP	7 Dokumen	Kepala Sub Bagian Perencanaan
2	Terlaksananya penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja DPUPRP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja DPUPRP	5 Laporan	

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

3	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang	Kepala Sub Bagian Keuangan
4	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dok	
5	Terlaksananya Penyediaan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Paket	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
6	Terlaksananya Diklat Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan TugaSs dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	
7	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	
8	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10 Paket	
9	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	
10	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	
11	Terlaksananya Penyediaan Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	
12	Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket/Bahan Material Yang Disediakan	0 Paket	
13	Terlaksananya Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	
14	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dok	
15	Terlaksananya Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang disediakan	2 Unit	
16	Terlaksananya Penyediaan Paket Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	35 Unit	
17	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	
18	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan	
19	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	
20	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Jabatanyang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	

21	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	48 Unit		
22	Terlaksananya Pemeliharaan Peraltan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	60 Unit		
23	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit		
24	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Grdung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit		
25	Meningkatnya retribusi jasa sewa alat dan pengujian material konstruksi	Jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat uji material konstruksi	Rp. 95.000.000,-	Kepala UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi	
		Jumlah Penerimaan retribusi atas jasa sewa alat berat	Rp. 405.000.000,-		
26	Melakukan Pemenuhan Sarana dan Prasarana UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi	Jumlah alat berat yang dipenuhi	2 Buah		
		Jumlah alat material konstruksi yang dipenuhi	-		
27	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi	Jumlah alat uji material konstruksi yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	71 Buah		Kepala Sub Bagian TU UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi
28	Melakukan pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Unit		
29	Melakukan pelayanan administrasi UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi	Jumlah fasilitas pelayanan administrasi UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi	200 Pelayanan		
30	Melakukan fasilitas peningkatan SDM UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi	Jumlah SDM UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi	40 Orang		

D. Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023

Pada tahun anggaran 2023 program dan kegiatan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut yaitu berjumlah 12 program dengan 19 kegiatan dan 35 sub kegiatan yang terbagi kedalam 5 bidang dan 1

sekretariat. Sedangkan program dan kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut berjumlah 1 program dengan 4 kegiatan dan 9 sub kegiatan.

Program dan kegiatan yang ada pada masing – masing bidang, sekretariat dan Unit Pelaksana Teknis bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.13
Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	
	DPUPRP	608,767,318,044
A	SEKRETARIAT	17,359,891,939
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17,359,891,939
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	469,998,249
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29,999,164.
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	439,999,085
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,625,358,686
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,515,359,600
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	109,999,086
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	233,844,406
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	233,844,406
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	335,550,000
6	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	111,550,000
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	224,000,000

4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,092,874,252
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17,998,835
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	932,742,117
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22,461,978
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	54,976,172
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,000,000
13	Penyediaan Bahan/Material	10,000,000.00
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,049,500,000
15	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1,995,150
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	291,368,054
16	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66,600,000
17	Pengadaan Mebel	224,768,054
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,183,942,092
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	418,000,000
19	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,765,942,092
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	337,156,200
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14,959,200
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18,057,500
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49,783,500
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	88,356,000

B	SUMBER DAYA AIR	119,048,200,460
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	119,048,200,460
1	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	92,413,585,517
26	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	0
19	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	631,696,256.
20	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	3,399,958,713
21	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampungan Air Lainnya	0
22	Normalisasi/Restorasi Sungai	16,903,061,147
23	Pembangunan Breakwater	5,099,991,369
24	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	15,698,718,699
25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	999,952,693
26	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	11,499,674,390
27	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	28,292,917,230
28	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	1,000
29	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Kontruksi Pengendali Banjir, Lahar dan Pengaman Pantai	2,750,000,000
30	Pembangunan Embung dan Penempungan Air Lainnya	2,867,740,312
31	Rehabilitasi Tanggul Sungai	3,119,872,708
32	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Kontruksi Air Tanah dan Air Baku	1,000
33	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Kontruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampungan Air Lainnya	1,150,000,000
2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	26,634,814,943

34	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	3,035,878,515
35	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	3,099,664,819
36	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	0
37	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	0
38	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	14,949,440,144
39	Operasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	999,920,293
40	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Irigasi	0
41	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	2,099,974,262
42	Operasi Kelembagaan Pengelolaan Irigasi	249,737,110
43	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Kontruksi Irigasi Rawa	2,199,999,800
C	BIDANG CIPTA KARYA DAN JASA KONSTRUKSI	204,463,176,753
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	28,176,685,087
1	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	28,176,685,087
44	Penyusunan Rencana, Kebijakan Strategis dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1,096,772,726
45	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	5,298,386,363
46	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	12,414,466,000
47	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	9,367,059,998
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	7,278,118,000
2	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	7,278,118,000
48	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD)	7,278,118,000
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM	23,811,288,625

	DRAINASE	
3	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	23,811,288,625
49	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	22,913,000,000
50	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	898,288,625
4	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	144,897,085,041
4	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	144,897,085,041
51	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	144,897,085,041
5	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	300,000,000
5	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	300,000,000
52	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	300,000,000
D	BINA MARGA	256,735,133,618
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	256,735,133,618
1	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan	256,735,133,618
53	Penyusunan Rencana< Kebijakan Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	6,799,999,999
54	Penggantian Jembatan	19,099,999,556
55	Pembangunan jalan	36,755,0174,399
56	Rekontruksi jalan	48,934,068,100
57	Pelebaran Jalan Meuju Standar	3,498,903,404
58	Pemeliharaan Rutin Jembatan	11,999,631,742
59	Rehabilitasi Jembatan	5,099,999,998

60	Pembangunan Jembatan	31,099,999,517
61	Rehabilitasi Jalan	75,949,499,964
62	Pemeliharaan Rutin Jalan	17,498,016,939
E	BIDANG TATA RUANG	3,491,729,101
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3,491,729,101
1	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	3,491,729,101
48	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	799,632,544
49	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	127,236,180
2	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	2,469,340,377
50	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	204,558,000
51	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	2,264,782,377
3	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	95,520,000
52	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	95,520,000
F	BIDANG PERTANAHAN	1,974,896,660
1	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	1,347,165,868
1	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,347,165,868
53	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	651,481,306
54	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	695,684,562
1	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	627,730,792

1	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	627,730,792
55	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	627,730,792
G	UPTD PERALATAN DAN PENGUJIAN MATERIAL KONSTRUKSI	5,694,289,513
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,694,289,513
1	Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah	9,490,500
56	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	9,490,500
2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	789.915,073
57	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9,963,433
58	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14,991,523
59	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9,965,864
60	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9,999,531
61	Penyediaan Bahan/Material	110,963,222
62	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	634,031,500
3	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16,167,200.00
63	Pengadaan Kendaraan Dinas Operaional atau Lapangan	4,762
64	Pengadaan Alat Besar	2,200,600,020
65	Pengadaan Mebel	9,990,000
66	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15,263,637
67	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	169,761,381
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	499,264,140

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

68	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	132,000,000
69	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	199,981,200
70	Pemeliharaan Mebel	1,000,000
71	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	119,270,000
72	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47,012,940

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut selama tahun 2024.

Laporan Kinerja tahun 2024 ini merupakan laporan kinerja yang menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, output, dan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

A. AKUNTABILITAS KINERJA

1. Sasaran RPD

Didalam RPD Kabupaten Tanah Laut 2024 - 2026 bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut melaksanakan Tujuan ke 2 yaitu Peningkatan Ekonomi Masyarakat Secara merata dengan pembangunan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan yaitu pada sasaran Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas.

Dimana target dan realisasi sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Bupati Tanah Laut yang termuat dalam RPD 2024-2026 yang diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dapat dilihat ada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Sasaran Strategis RPJMD Yang Diampu Dinas PUPRP

Tujuan ke 2	Peningkatan Ekonomi Masyarakat Secara merata dengan pembangunan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan	
Sasaran Strategis	Meningkatnya pembangunan infrastuktur yang berkualitas	Indeks Infrastruktur

Sasaran Meningkatkan pembangunan infrastuktur yang berkualitas.

Pada sasaran Meningkatkan pembangunan infrastuktur yang berkualitas diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu Indeks Infrastruktur, dimana realisasi dan capaian Indeks Infrastruktur yang diampu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Realisasi dan Capaian Indeks Pembangunan Infrastruktur Tahun 2023 Pada Dinas PUPRP
(Sumber Data Bidang Mina Marga, CKJK dan Sumber Daya Air)

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2023		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	Jalan Dalam Kondisi Baik	Km	603,58	583.48	96,6
2	Jumlah Panjang Jalan Keseluruhan	Km	1058,91	1058,91	100
3	Jumlah Panjang Irigasi Dalam Kondisi Baik (meter)	Meter	521.500,389	521.500,389	100.00
4	Jumlah Panjang Irigasi (meter)	Meter	753,940.13	753,940.13	100.00
5	Jumlah Luas Areal Yang Dilayani Irigasi (hektar)	Hektar	17,503	17,503	100.00
6	Jumlah Luas Areal Yang Harus Dilayani Irigasi (meter)	Hektar	25,685.98	17,503	68,14
7	Jumlah Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	Meter	95,349.00	95,569.20	100.23
8	Jumlah Panjang Drainase	Meter	21.247	21.247	100
9	Jumlah Kebutuhan Air Baku Yang Sudah Dapat Dilayani (liter/tahun)	Liter	7.459.432.000	7.480.339.200	100,28
10	Jumlah Kebutuhan Air Baku (Liter/Tahun)	Liter	10.114.062.400	10.114.062.400	100
11	Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Bersih	KK	65.455	65.455	100
12	Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Limbah	KK	69.020	69.020	100
13	Panjang Jalan Di Perkotaan	Km	345,18	251,23	72,78
14	Jumlah Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	Buah	496	496	100

15	Jumlah Gedung Kantor	Buah	503	503	100
----	----------------------	------	-----	-----	-----

* *Data Tahun 2023*

Tabel 3.3
Realisasi dan Capaian Indeks Pembangunan Infrastruktur Tahun 2024 Pada Dinas PUPRP
 (Sumber Data Bidang Mina Marga, CKJK dan Sumber Daya Air)

	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	Panjang Jalan kondisi Mantap	Persen	1552,64	583,48	37,57
2	Panjang jalan	Km	1826,63	1058,91	57,97
3	Panjang Irigasi dalam kondisi Baik	Ha	536.482,37	536.482,3778	100
4	Panjang Irigasi	Ha	753.940,132	753.940,132	100
5	Rumah Tangga Akses Air Bersih	Rumah Tangga	65723	65723	100
6	Rumah Tangga akses Sanitasi Layak	Rumah Tangga	64422	64422	100
7	Rumah Tangga	Rumah Tangga	86569	86569	100
8	Panjang jalan yang ber drainase	Km	112,625	112,625	100
9	Panjang jalan	Km	1058,91	1058,91	100

* *Data Tahun 2024*

1. Perbandingan Realisasi Dan Target

a. Panjang Jalan Kondisi Mantap

Pada tahun 2024 indikator Panjang Jalan kondisi Mantap ditargetkan sepanjang 603,58 km dan telah terealisasi sepanjang 583.48 km, sehingga dapat dilihat bahwa capaian indikator Panjang Jalan kondisi Mantap adalah sebesar 96,6% dari yang ditargetkan.

b. Panjang Jalan

Pada tahun 2024 indikator jumlah panjang jalan keseluruhan sebagaimana SK Jalan Kabupaten Tahun 2023 sepanjang 1058,91 km, namun pada tahun 2024 tidak ada penambahan jumlah panjang jalan, maka jumlah panjang jalan keseluruhan adalah tetap yaitu sepanjang 1058,91 km, sehingga dapat dilihat bahwa capaian indikator jumlah panjang jalan keseluruhan adalah sebesar 100%. Dengan persentase kondisi jalan mantap sebesar 55,1%.

c. Panjang Irigasi Dalam Kondisi Baik

Pada tahun 2024 indikator jumlah panjang irigasi dalam kondisi baik ditargetkan sepanjang 536,482.378 meter dan telah terealisasi sepanjang 536,482.378 meter, sehingga dapat dilihat bahwa capaian indikator jumlah panjang irigasi dalam kondisi baik adalah sebesar 100%.

d. Panjang Irigasi

Pada tahun 2024 indikator jumlah panjang irigasi ditargetkan sepanjang 753.940,132 meter dan telah teralisasi sepanjang 753.940,132 meter, sehingga dapat dilihat bahwa capaian indikator jumlah panjang irigasi adalah sebesar 100%. Dengan persentase panjang irigasi dalam kondisi baik sebesar 71,11%.

e. Rumah Tangga Akses Ari Bersih

Untuk indikator jumlah Rumah Tangga Berakses Air Bersih pada tahun 2024 ditargetkan sejumlah 65.406 KK, dan telah terealisasi 68.433 KK, sehingga dapat dilihat bahwa indikator jumlah rumah tangga berakses air bersih tercapai 100%.

f. Rumah Tangga Akses Sanitasi Layak

Untuk indikator jumlah Rumah Tangga Berakses sanitasi layak pada tahun 2024 ditargetkan sejumlah 65.241 KK, dan telah terealisasi 65.241 KK, sehingga dapat dilihat bahwa indikator jumlah rumah tangga berakses sanitasi layak tercapai 100%.

g. Rumah Tangga

Untuk indikator Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 sebanyak 86.988 KK

h. Panjang Jalan Berdrainase

Untuk indikator panjang jalan berdraina di kabupaten tanah laut pada tahun 2024 ditargetkan sejumlah 112.615 meter, dan telah terealisasi 112.615 meter, sehingga dapat dilihat bahwa indikator panjang jalan berdrainase di kabupaten tanah laut tercapai 100%.

i. Panjang Jalan

Pada tahun 2024 indikator jumlah panjang jalan keseluruhan sebagaimana SK Jalan Kabupaten Tahun 2023 sepanjang 1058,91 km, namun pada tahun 2024 tidak ada penambahan jumlah panjang jalan, maka jumlah panjang jalan keseluruhan adalah tetap yaitu sepanjang 1058,91 km, sehingga dapat dilihat bahwa capaian indikator jumlah panjang jalan keseluruhan adalah sebesar 100%. Dengan persentase kondisi jalan mantap sebesar 55,1%.

2. Perbandingan Realisasi Dan Realisasi Terkait

a. Panjang Jalan Kondisi Mantap

Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap, Berdasarkan data jalan yang telah terverifikasi tahun 2022 sepanjang 1342,15 km atau sebesar 73,48%, tahun 2023 sepanjang 1272,07 Km atau sebesar 69,64% terhadap panjang jalan pada SK Jalan Kabupaten Tahun 2015 sepanjang 1826,63 km, Kemudian pada tahun 2024 kondisi jalan mantap sepanjang 583,48 Km atau sebesar 55,1% terhadap SK Jalan Kabupaten Tahun 2023 sepanjang 1058,91 km. Jadi capaian kinerja untuk tahun 2024 menurun sebesar 14,54% dari tahun lalu.

b. Panjang Jalan

Untuk jumlah panjang jalan keseluruhan sebagaimana SK Jalan pada tahun 2015 yaitu sepanjang 1826,63 km dan tahun 2023 terdapat perubahan pada SK Jalan berdasarkan SK Bupati Tanah Laut No. 188.45/992-KUM/2023 Tentang Penetapan Ruas Jalan Kabupaten Tanah Laut sepanjang 1058,91 Km, sehingga dapat dikatakan bahwa panjang jalan secara keseluruhan berbeda dengan tahun sebelumnya 1826,63 km menjadi 1058,91 Km.

c. Panjang Irigasi Dalam Kondisi Baik

Untuk indikator jumlah panjang irigasi dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2023 telah terbangun sepanjang 521.500,389 meter, kemudian pada tahun 2024 terjadi peningkatan menjadi 536,482.378 meter atau sebanyak 14.981.989 meter.

d. Panjang Irigasi

Untuk indikator jumlah panjang irigasi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tidak ada kenaikan target panjang irigasi, hal ini sesuai dengan hasil inventarisasi bidang SDA yaitu rigasi yang ada di Kabupaten Tanah Laut adalah sepanjang 753.940,132 meter. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021-2024 lebih difokuskan kepada peningkatan kualitas konstruksi pada jaringan yang sudah ada saat ini.

e. Rumah Tangga Akses Ari Bersih

Untuk indikator jumlah Rumah Tangga Berakses Air Bersih pada tahun 2023 sejumlah 65.406 SR/KK, kemudian pada tahun 2024 tercapai sejumlah 68.433 SR/KK atau meningkat sebesar 3%.

f. Rumah Tangga Akses Sanitasi Layak

Untuk indikator jumlah Rumah Tangga berakses Sanitasi Layak pada tahun 2023 sejumlah 65.241 Unit/KK, kemudian pada tahun 2024 tercapai sejumlah 67.850 Unit/KK atau meningkat sebesar 3%.

g. Rumah Tangga

Untuk indikator Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 sebanyak 86.988 KK, lebih banyak dari jumlah tahun 2023 sebesar 86.569 KK.

h. Panjang Jalan Berdrainase

Untuk indikator panjang Jalan berdrainase di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2023 terbangun sepanjang 100.615 Meter, kemudian pada tahun 2024 terbangun sepanjang 112,615 Meter atau bertambah sepanjang 12.010 Meter.

i. Panjang Jalan

Untuk jumlah panjang jalan keseluruhan sebagaimana SK Jalan pada tahun 2015 yaitu sepanjang 1826,63 km dan tahun 2023 terdapat perubahan pada SK Jalan berdasarkan SK Bupati Tanah Laut No. 188.45/992-KUM/2023 Tentang Penetapan Ruas Jalan Kabupaten Tanah Laut sepanjang 1058,91 Km, sehingga dapat dikatakan bahwa panjang jalan secara keseluruhan berbeda dengan tahun sebelumnya 1826,63 km menjadi 1058,91 Km.

3. Analisa Penurunan/Peningkatan Kinerja

a. Panjang Jalan Kondisi Mantap

Pada indikator Panjang jalan dalam kondisi mantap dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2024 terjadi penurunan sebesar 14,54%, penurunan ini dikarenakan perubahan SK Jalan Kabupaten dari SK Jalan Kabupaten tahun 2015 ke SK Jalan Kabupaten tahun 2023.

Rumusan perhitungan dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$P (\%) = \frac{P \text{ Jalan Kondisi Baik}}{P \text{ Jalan pada SK}} \times 100$$

Dimana:

P = Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik

P irigasi = Panjang Jalan pada SK

b. Panjang Jalan

Pada indikator jumlah panjang jalan keseluruhan pada tahun 2024 terdapat perubahan pada SK Jalan berdasarkan SK Bupati Tanah Laut No. 188.45/992-KUM/2023 Tentang Penetapan Ruas Jalan Kabupaten Tanah Laut, sehingga dapat dikatakan bahwa panjang jalan secara keseluruhan berbeda dengan tahun sebelumnya pada SK Jalan 2015 yaitu 1826,63 km menjadi 1058,91 Km pada SK Jalan 2023.

Rumusan perhitungan dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$P = \text{Jumlah Panjang Keseluruhan Jalan Kabupaten pada SK Jalan}$$

Dimana:

P = Panjang Jalan

c. Panjang Irigasi Dalam Kondisi Baik

Jumlah panjang irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 14.981.989 meter, hal ini karena telah dilaksanakannya rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, sehingga panjang irigasi dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2024 adalah 528.854,865 meter.

Rumusan perhitungan dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$P = \frac{P \text{ baik}}{P \text{ irigasi}}$$

Dimana:

P baik = Panjang Irigasi Dalam Kondisi Baik

P irigasi = Panjang Irigasi

Semakin tinggi kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi menyebabkan peningkatan perbaikan irigasi pada saluran primer, sekunder, tersier, suplesi dan pembuang untuk meningkatkan nilai panjang irigasi dalam kondisi baik.

d. Panjang Irigasi

Jumlah panjang irigasi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 adalah sama, sehingga tidak terjadi peningkatan/penurunan, hal ini sesuai dengan data inventarisasi bidang SDA, sehingga panjang irigasi sampai dengan tahun 2024 adalah tetap yaitu 753.940,132 meter. Hal ini disebabkan karena tidak dilaksanakannya penambahan panjang irigasi baru, Bidang Sumber Daya Air lebih mengutamakan optimalisasi pada jaringan irigasi yang sudah terbangun sebelumnya.

Tidak adanya pengembangan irigasi menyebabkan panjang saluran irigasi (primer, sekunder, tersier, suplesi dan pembuang) tidak mengalami perubahan.

e. Rumah Tangga Akses Ari Bersih

Pada indikator jumlah rumah tangga berakses air bersih mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 3%, dimana tahun 2023 tercapai sebesar 75% sedangkan pada tahun 2024 menjadi 78%.

Rumusan perhitungan dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$SR\ Air = \frac{SR\ Air\ 2024}{RT}$$

Dimana:

SR Air = Sambungan Rumah

KK = Jumlah KK di Kab. Tanah Laut

semakin banyak jumlah SR terpasang ditahun berjalan, semakin tinggi persentase Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih.

f. Rumah Tangga Akses Sanitasi Layak

Pada indikator jumlah rumah tangga berakses sanitasi layak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 3%, dimana tahun 2023 tercapai sebesar 75% sedangkan pada tahun 2024 menjadi 78%.

Rumusan perhitungan dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$Unit\ Sanitasi = \frac{Unit\ Sanitasi\ 2024}{KK}$$

Dimana:

Unit Sanitasi = Jumlah Unit

KK = Jumlah KK di Kab. Tanah Laut

semakin banyak jumlah SR terpasang ditahun berjalan, semakin tinggi persentase Jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak.

g. Rumah Tangga

Untuk indikator Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 sebanyak 86.988 KK berdasarkan data Badan Pusat Statistik.

h. Panjang Jalan Berdrainase

untuk indikator Jumlah Panjang jalan berdrainase mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2024 dengan dukungan dari APBD dan Pokok Pikiran Anggota Legislatif.

Rumusan perhitungan dapat dijelaskan sebagai berikut

$$P\ Irigasi = P\ irigasi\ (N - 1) + P\ irigasi\ Terbangun(N)$$

Dimana:

P irigasi = Panjang Irigasi

P irigasi N-1 = Panjang Irigasi tahun sebelumnya

P irigasi N = Panjang Irigasi tahun berjalan

i. Panjang Jalan

Pada indikator jumlah panjang jalan keseluruhan pada tahun 2024 terdapat perubahan pada SK Jalan berdasarkan SK Bupati Tanah Laut No. 188.45/992-KUM/2023 Tentang Penetapan Ruas Jalan Kabupaten Tanah Laut, sehingga dapat dikatakan bahwa panjang jalan secara keseluruhan berbeda dengan tahun sebelumnya pada SK Jalan 2015 yaitu 1826,63 km menjadi 1058,91 Km pada SK Jalan 2023.

Rumusan perhitungan dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$P = \text{Jumlah Panjang Keseluruhan Jalan Kabupaten pada SK Jalan}$$

Dimana:

P = Panjang Jalan

4. Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama bahwa IKU disusun dan ditetapkan sendiri oleh setiap organisasi dalam rangka mengukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4
Target, Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama DPUPRP
(Sumber Data Bidang Mina Marga, CKJK dan Sumber Daya Air)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya infrastruktur jalan yang berkualitas	1	Persentase Jalan dalam kondisi mantap	57 %	55,1%	96,6%
2	Meningkatnya kinerja tata kelola Perangkat daerah yang akuntabel	1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	82	102,5
3	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air yang berkualitas dan berfungsi dengan baik	1	Luasan lahan yang teraliri irigasi dengan baik	12446.383 Hektar	12.446,383	100
		2	Persentase luasan genangan/banjir	84,20 %	81.60 %	103,19
4	Meningkatnya rumah tangga dengan akses air minum layak dan sanitasi layak	1	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	3 %	3%	100
		2	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	3 %	3%	100
5	Meningkatnya pemanfaatan tanah daerah.	1	Persentase aset tanah pemda yang termanfaatkan dengan baik	50 %	50%	100
6	Meningkatnya penataan bangunan gedung kantor pemerintah	1	Persentase bangunan gedung kantor pemerintah yang tertata dengan baik	80 %	80	100
7	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	85,47	99,91	116.89

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5
Capaian IKU Dinas PUPRP Terhadap Target Tahun 2024
 (Sumber Data Bidang Mina Marga, CKJK dan Sumber Daya Air)

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Jalan dalam kondisi mantap	Persentase	57 %	55,1%	96,6%
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80	82	102,5
3	Luasan lahan yang teraliri irigasi dengan baik	Hektar	12446.383	12.446,383	100
4	Persentase luasan genangan/banjir	Persentase	84,20	81.60 %	103,19
5	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	Persentase	3	3%	100
6	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	Persentase	3	3%	100
7	Persentase aset tanah pemda yang termanfaatkan dengan baik	Persentase	50	50%	100
8	Persentase bangunan gedung kantor pemerintah yang tertata dengan baik	Persentase	80	80	100
9	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	Persentase	85,47	99,91	116.89

* Data Tahun 2024

Tabel 3.6
Capaian IKU Dinas PUPRP Terhadap Target pada Tahun Sebelumnya
 (Sumber Data Bidang Mina Marga, CKJK dan Sumber Daya Air)

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realiasi		Tahun 2024		
			2022	2023	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap)	Persentase	73,48	69,64	57	55,1%	96,6%
2	Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	Persentase	63,09	67,62	63	65,68%	104,25%
3	Persentase Irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persentase	67	68,077	68,01	69,17%	100
4	Persentase penduduk berakses air minum sehat	Persentase	14,46	73,71	31,74	31,74%	100%
5	Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik	Persentase	53,28	73,45	75,02	75,02%	100%
6	Persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	Persentase	87	92	98	94,79%	96,94
7	Persentase penyelesaian sengketa/konflik pertanahan	Persentase	100	100	100	100%	100
8	Persentase terkosolidasinya tanah di Kabupaten Tanah Laut	Persentase	100	100%	100	100%	100

* Data Tahun 2022, 2023 dan 2024

Adapun rincian dan analisa capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

SASARAN 1 : Meningkatnya infrastruktur jalan yang berkualitas.

Sasaran Meningkatnya infrastruktur jalan yang berkualitas diukur dengan 1 (satu) indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.7
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 IKU DPUPRP
(Sumber Data Bidang Bina Marga)

	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	Panjang Jalan Rusak	Persentase	475 Km	475,43 Km	100,09
2	Persentase panjang jalan yang memiliki konstruksi sesuai design	Persentase	100%	100%	100

* Data Tahun 2024

1. Perbandingan Realisasi dan Target.

Persentase Jalan dalam kondisi mantap kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap) tahun 2024 terealisasi sebesar 55,1% dari panjang jalan 1058,91 km atau terealisasi sepanjang 583,48 km, dari yang ditargetkan sebesar 57% atau sepanjang 603,58 km, sehingga dapat dilihat capaian kinerja jalan dalam kondisi baik dan sedang (mantap) adalah 96,6%.

a. Panjang Jalan Rusak

Pencapaian indikator kinerja panjang jalan rusak yaitu Panjang Jalan kabupaten dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat (kondisi Tidak Mantap). Berdasarkan data teknis jalan Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 Panjang Jalan kabupaten dalam kondisi rusak ringan sebesar 128,64 Km dan Panjang Jalan kabupaten dalam kondisi rusak berat sebesar 346,79 Km. Total panjang jalan rusak (kondisi Tidak Mantap) sebesar 475,43 Km sehingga dapat dilihat capaian kinerja indikator kinerja panjang jalan rusak sebesar 100,09%.

b. Persentase panjang jalan yang memiliki konstruksi sesuai design

Pencapaian indikator kinerja Persentase panjang jalan yang memiliki konstruksi sesuai design tahun 2024 terealisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan, sehingga dapat dilihat capaian kinerja Persentase panjang jalan yang memiliki konstruksi sesuai design adalah 100%.

Sedangkan realisasi kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 IKU DPUPRP
(Sumber Data Bidang Bina Marga)

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realiasi			Tahun 2024		
			2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian %
1	Panjang Jalan Rusak	Km	592,668	484,48	554,55	475	475,43	100,09
2	Persentase panjang jalan yang memiliki konstruksi sesuai design	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%

* Data Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

a. Panjang Jalan Rusak

Realisasi kinerja indikator Panjang Jalan Rusak tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023, dimana tahun 2021 Panjang Jalan Rusak 592,668Km, Tahun 2022 Panjang Jalan Rusak 484,48 Km, Tahun 2023 Panjang Jalan rusak 554,55 Km, dan tahun 2024 Panjang Jalan Rusak 475,43 Km, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Panjang Jalan Rusak yaitu 100,09% dari target yang ditetapkan.

b. Persentase panjang jalan yang memiliki konstruksi sesuai design

Pencapaian indikator kinerja Persentase panjang jalan yang memiliki konstruksi sesuai design tahun 2021-2024 terealisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan, sehingga dapat dilihat capaian kinerja Persentase panjang jalan yang memiliki konstruksi sesuai design adalah 100%.

- Efisiensi Anggaran Sasaran 1

Sasaran 1 (Meningkatnya infrastruktur jalan yang berkualitas)

Untuk sasaran 1 dengan 1 indikator dan 1 Program pengampu terdapat efisiensi anggaran sebesar 7,03 %, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.9
Efisiensi Anggaran Sasaran 1
(Sumber Data Bidang Bina Marga)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Capaian Kinerja	Efisiensi
Meningkatnya infrastruktur jalan yang berkualitas	Persentase Jalan dalam kondisi mantap	92,60%	99,63%	7,03%

* Data Tahun 2024

Sasaran 2 : Meningkatkan kinerja tata kelola Perangkat daerah yang akuntabel.

Pada sasaran meningkatnya kinerja tata kelola perangkat daerah yang akuntabel. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan diukur melalui 1 indikator, yang realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.10
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2
(Sumber Data Sekretariat)

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	82	102,5

* Data Tahun 2024

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Pencapaian indikator kinerja Nilai SAKIP Dinas PUPRP tahun 2024 mampu memperoleh penilaian untuk SAKIP yaitu nilai 82 dengan predikat "A". Hal ini menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja :Memuaskan", yaitu terdapat gambaran bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil. Hasil tersebut menunjukkan bahwa SAKIP DPUPRP mengalami peningkatan dari nilai yang ditargetkan yaitu dengan nilai 80, sehingga dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja Nilai SAKIP adalah 102,5%.

Sedangkan realisasi kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2
(Sumber Data Sekretariat)

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realiasi			Tahun 2024		
			2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian %

1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,07	74,6	76,6	80	82	102,5
---	------------------------------	-------	-------	------	------	----	----	-------

* Data Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi indikator kinerja Nilai SAKIP tahun 2024 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan tahun 2023, dimana tahun 2024 Nilai SAKIP yang diperoleh sebesar 82 sedangkan tahun 2023 Nilai SAKIP yang diperoleh sebesar 76,6, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Nilai SAKIP mengalami peningkatan sebesar 2%.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Pada indikator kinerja Nilai SAKIP mengalami peningkatan dimana penilaian pada Laporan Kinerja yang disampaikan ada komponen yang menjadi penilaiannya secara garis besar seluruh komponen yang menjadi penilaian pada Reviu SAKIP nilai yang diperoleh sudah memuaskan. Hasil penilaian ini akan dijadikan pedoman dan acuan untuk penyusunan Laporan Kinerja yang akan datang agar menjadi lebih baik lagi dengan memperhatikan dan menindaklanjuti beberapa Rekomendasi Tim Evaluasi Sakip sebagai berikut :

1. Dokumen Perencanaan kinerja agar dipublikasikan pada Website resmi Dinas PUPRP atau pada Website PPID Kabupaten Tanah Laut
2. Dalam Menyusun Perencanaan kinerja agar senantiasa menyajikan hubungan kinerja, strategi, kebijakan, dan aktivitas antar bidang/ dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*).

- Efisiensi Anggaran Sasaran 2

Sasaran 2 (Meningkatnya kinerja tata kelola Perangkat daerah yang akuntabel.)

Untuk sasaran 2 dengan 1 indikator dan 1 Program pengampu terdapat efisiensi anggaran sebesar 1,79 % , sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.12
Efisiensi Anggaran Sasaran 1
 (Sumber Data Sekretariat)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Capaian Kinerja	Efisiensi
Meningkatnya kinerja tata kelola Perangkat daerah yang akuntabel.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86,63 %	102,5 %	15,87 %

* Data Tahun 2024

SASARAN 3 : Meningkatnya infrastruktur sumber daya air yang berkualitas dan berfungsi dengan baik.

Sasaran meningkatnya infrastruktur sumber daya air yang berkualitas dan berfungsi dengan baik diukur melalui 2 (dua) indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.13
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 IKU DPUPRP
(Sumber Data Bidang SDA)

	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	Luasan lahan yang teraliri irigasi dengan baik	Hektar	12446.383	12.446,383	100
2	Persentase luasan genangan/banjir	Persentase	84,20 %	81,60 %	103,19

* Data Tahun 2024

1. Perbandingan Realisasi dan Target.

a. Luasan lahan yang teraliri irigasi dengan baik

Pencapaian indikator kinerja pada tahun 2024 adalah 12.466,383 Hektar atau sebesar 100% dari target Renstra yaitu 12.446,383 Hektar. Hal ini disebabkan karena pagu anggaran kegiatan yang tersedia untuk pekerjaan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi belum dapat mengakomodir seluruh kebutuhan di lapangan.

b. Persentase luasan genangan/banjir

Pencapaian indikator kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 81,60%. Ini menunjukkan bahwa kinerja bidang Sumber Daya Air melebihi target Renstra untuk persentase luasan genangan/banjir yaitu 84,20%, atau sebesar 103,19%. Semakin kecil persentase genangan maka semakin baik kinerja bidang Sumber Daya Air dalam menangani banjir di Kabupaten Tanah Laut.

Sedangkan realisasi kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 IKU DPUPRP
(Sumber Data Bidang SDA)

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realiasi			Tahun 2024		
			2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian %

1	Luasan lahan yang teraliri irigasi dengan baik	Hektar	11.765,26	11.915,520	12.106,825	12.446,383	12.446,383	100
2	Persentase luasan genangan/banjir	Persentase	87,45%	86.87%	86.65%	84,20 %	81,60 %	103,19

* Data Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

- Kendala dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran meningkatnya infrastruktur sumber daya air yang berkualitas dan berfungsi dengan baik selama tahun 2024 yaitu :

1. Terbatasnya anggaran yang tersedia untuk mengatasi berbagai permasalahan ke-Sumber Daya Air-an di Kabupaten Tanah Laut.
2. Ketersediaan lahan dan akses lokasi yang cukup menyulitkan pada saat pelaksanaan pekerjaan.
3. Cuaca yang tidak dapat diprediksi cukup menghambat kelancaran pekerjaan.
4. Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat untuk memelihara jaringan irigasi secara mandiri
5. Kurangnya sumber daya manusia untuk operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
6. Berubahnya tata fungsi lahan mengakibatkan debit air yang semakin menurun pada jaringan irigasi terutama di musim kemarau.
7. Cuaca dan iklim ekstrim tidak menentu mengakibatkan terjadinya peningkatan kerusakan pada infrastruktur sumber daya air terutama yang diakibatkan oleh abrasi dan longsor.
8. Pemukiman warga yang merambah sempadan sungai dan pantai.
9. Rusaknya bagian hulu DAS mengakibatkan percepatan aliran air yang meninggikan tingkat daya rusak.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Kerjasama dengan masyarakat dan aparat desa terkait permasalahan ketersediaan lahan pada saat konstruksi dilaksanakan.
2. Memaksimalkan peran serta aparat desa dan masyarakat agar juga terlibat dalam pembangunan.
3. Membuat metode kerja yang efektif dan maksimal serta menerapkan pengawasan ketat kepada pelaksana pekerjaan agar bekerja secara efektif dan maksimal.
4. Memastikan adanya hibah tanah sesuai kebutuhan perencanaan konstruksi .
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat baik melalui penyuluhan ataupun pendekatan persuasif ke aparat terkait dan kelompok tani.
6. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang sumber daya air.
7. Menata daerah hulu dengan cara berkoordinasi baik secara vertikal maupun sektoral.
8. Memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya mitigasi bencana.

9. Perlunya aturan penerapan batas sempadan sungai dan pantai yang sesuai karakteristik daerah.
10. Perlunya kerjasama lintas sektoral menangani kerusakan DAS.

i. Efisiensi Anggaran Sasaran 3

Sasaran 3 (Meningkatnya infrastruktur sumber daya air yang berkualitas dan berfungsi dengan baik)

Untuk sasaran 3 dari 2 indikator dan 1 Program pengampu terdapat efisiensi anggaran sebesar 7,78 % dan 15,18 %, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.15
Efisiensi Anggaran Sasaran 3
(Sumber Data Bidang SDA)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Capaian Kinerja	Efisiensi
Meningkatnya infrastruktur sumber daya air yang berkualitas dan berfungsi dengan baik	Luasan lahan yang teraliri irigasi dengan baik	90,866%	98,644%	7,78%
	Persentase luasan genangan/banjir	88,011%	103,19%	15,18%

* Data Tahun 2024

SASARAN 4 : Meningkatkan rumah tangga dengan akses air minum layak dan sanitasi layak.

Sasaran Meningkatkan rumah tangga dengan akses air minum layak dan sanitasi layak diukur melalui 2 (dua) indikator, yang realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.16
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4 Tahun 2024 IKU DPUPRP
(Sumber Data Bidang CKJK)

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	Persentase	3 %	3 %	100%
2	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	Persentase	3 %	3 %	100%

* Data Tahun 2024

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.
 - a. Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak.

Realisasi indikator kinerja Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan realisasi kinerja tahun sebelumnya, dimana tahun 2024 terealisasi sebesar 78,67 sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar 75,19% dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase penduduk berakses air minum layak adalah sebesar 78,67%. Untuk pelayanan pokok air minum target tahun pada tahun 2024 sebesar 68.433 KK dan teralisasi sebesar 68.433 KK dari jumlah penduduk sebanyak 86.988 KK. sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase rumah tangga yang memiliki air bersih yang baik adalah meningkat sebesar 78,67%. Masih dibawah capaian Provinsi Kalimantan Selatan dengan target indikator cakupan pelayanan air minum yang layak pada tahun 2024 terealisasi sebesar 88,68% dari target 88,68%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%.

b. Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak.

Pencapaian indikator Kinerja Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak tahun 2024 terealisasi sebesar 75,02% dari yang ditargetkan sebesar 75,02%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik adalah 100%. Sebagai Perbandingan pada capaian Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 realisasi indikator cakupan pelayanan air limbah yang layak terealisasi sebesar 88,28% dari target 90,00% atau besar capaian kinerja sebesar 98,09%.

Sedangkan realisasi kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 IKU DPUPRP
 (Sumber Data Bidang CKJK)

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realiasi (akumulasi)			Pada Tahun 2024		
			2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	Persentase	69	72	75	3	3 (Akumulasi : 78)	100
2	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	Persentase	67	70	73	3	3 (Akumulasi : 76)	100

* Data Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

a. Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak.

Indikator kinerja kinerja Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan realisasi kinerja tahun sebelumnya, dimana tahun 2024 terealisasi sebesar 78,67 % sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar 75,19% dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase penduduk berakses air minum layak adalah sebesar 78,67 %. Untuk pelayanan pokok air minum target tahun pada tahun 2024 sebesar 65.455 KK dan teralisasi sebesar 65.455 KK dari jumlah penduduk sebanyak 86.569 KK. sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase rumah tangga yang memiliki air bersih yang baik adalah meningkat sebesar 3% (78)%.

b. Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak.

Realisasi indikator kinerja Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 67.850 Kk . Dimana tahun 2023 terealisasi sebesar 73% atau 65.241 Kk dari 86.988 Kk, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik adalah meningkat sebesar 3% (76)%.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

a. Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak.

Realisasi indikator kinerja persentase penduduk yang berakses air minum sehat, tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ini dapat dijelaskan bahwa adanya program batuan SPAM berbasis masyarakat serta adanya hibah air minum perdesaan dari Kementrian PUPR. Sedangkan kegiatan yang dilakukan pada indikator ini adalah Pembangunan SPAM dan Peningkatan SPAM Perdesaan dan Perkotaan.

b. Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak

Realisasi indikator kinerja persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi baik, tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ini dapat dijelaskan karena adanya kegiatan DAK Sanitasi. Dengan adanya anggaran dari pusat melalui DAK Kementerian PUPR mampu mendukung dan merealisasikan kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah, dengan demikian dapat juga membantu perbaikan pengelolaan sanitasi masyarakat khususnya masyarakat perdesaan. Kegiatan yang dilakukan pada indikator ini adalah pembangunan tangki septik baik menggunakan dana APBD maupun dana hibah dari pusat/DAK

ii. Efisiensi Sasaran 4 (Meningkatnya rumah tangga dengan akses air minum layak dan sanitasi layak)

Untuk sasaran 4 dari 2 indikator dan 2 Program pengampu terdapat efisiensi anggaran sebesar 6,19 % dan 0,44 %, menunjukkan efisiensi penggunaan dana pada salah satu indikator belum tercapai sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.18
Efisiensi Anggaran Sasaran 2
(Sumber Data Bidang CKJK)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Capaian Kinerja	Efisiensi
Meningkatnya rumah tangga dengan akses air minum layak dan sanitasi layak	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	93,81	100	6,19
	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	99,56	100	0,44

* Data Tahun 2024

SASARAN 5 : Meningkatkan Pemanfaatan Tanah Daerah.

Sasaran meningkatnya pemanfaatan tanah daerah diukur melalui 1 (satu) indikator, yang realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.19
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5 IKU DPUPRP
(Sumber Data Bidang Pertanahan)

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023/24		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase aset tanah pemda yang termanfaatkan dengan baik	Persentase	50%	50%	100

* Data Tahun 2024

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Pencapaian pada indikator Persentase aset tanah pemda yang tertib (Crosscutting dengan BPKAD) tahun 2024 terealisasi sebesar 50 % dari yang ditargetkan sebesar 50 %, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja aset tanah pemda yang termanfaatkan dengan baik adalah sebesar 100 %.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 tidak sama dengan tahun 2023 dimana untuk target tahun 2024 adalah 1 dokumen yaitu Dokumen Inventarisasi Aset Pemerintah Daerah pada Kecamatan Jorong dengan capaian persentase sebesar 100%. dan target pada tahun 2023 adalah

2 dokumen yaitu Dokumen Inventarisasi Aset Pemerintah Daerah pada Kecamatan Kurau dan Dokumen PTSL 2023 dengan capaian persentase sebesar 100%.

Sedangkan realisasi kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.20
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 IKU DPUPRP
(Sumber Data Bidang Pertanahan)

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realiasi			Tahun 2024		
			2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase aset tanah pemda yang termanfaatkan dengan baik	Persentase	100%	100%	100%	50%	50%	100

* Data Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi kinerja indikator Persentase aset tanah pemda yang tertib (Crosscutting dengan BPKAD) tahun 2024 realisasinya adalah tidak sama dengan tahun 2023, dimana tahun 2024 terealisasi sebesar 50% dengan capaian 100%, sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar 100% dengan capaian 100% dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja Persentase aset tanah pemda yang tertib (Crosscutting dengan BPKAD) adalah tetap.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Pada indikator kinerja Persentase aset tanah pemda yang tertib (Crosscutting dengan BPKAD) pada tahun 2024 realisasinya tidak sama dengan tahun 2023 yaitu 50% dari yang masing-masing ditargetkan. Kegiatan pada indikator ini adalah terkait Inventarisasi data asset bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dimana pada tahun 2024 dengan target 1 dokumen yaitu 1 Dokumen inventarisasi Asset Pemda pada Kecamatan Jorong telah terealisasi 50% dengan capaian kinerja 100%. dan pada tahun 2023 dengan target 2 dokumen pada 1 dokumen untuk Inventarisasi asset di Kecamatan Kurau dan 1 Dokumen Program Pendaftaran Tanah Sistemati Lengkap (PTSL) di Kabupaten Tanah Laut telah terealisasi 100% dengan capaian kinerja 100%.

iii. Efisiensi Sasaran 5 (Meningkatnya Pemanfaatan Tanah Daerah)

Untuk sasaran 5 terdapat efisiensi anggaran sebesar 23,78 % sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.21
Efisiensi Anggaran Sasaran 5
(Sumber Data Bidang Pertanahan)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Capaian Kinerja	Efisiensi
Meningkatnya Pemanfaatan Tanah Daerah	Persentase aset tanah pemda yang termanfaatkan dengan baik	76,22%	100%	23,78%

* Data Tahun 2024

SASARAN 6 : Meningkatkan penataan bangunan gedung kantor pemerintah

Sasaran meningkatnya penataan bangunan gedung kantor pemerintah diukur dengan 1 (satu) indikator, yang realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.22
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 IKU DPUPRP
(Sumber Data Bidang CKJK)

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase bangunan gedung kantor pemerintah yang tertata dengan baik	Persentase	80%	80 %	100

* Data Tahun 2024

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

a. Persentase konstruksi bangunan gedung kantor pemerintah dalam kondisi baik.

Pencapaian indikator kinerja Persentase konstruksi bangunan gedung kantor pemerintah dalam kondisi baik sebesar 80% dari 116.042 bangunan Gedung kantor milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Sedangkan realisasi kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.23
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 6 IKU DPUPRP
(Sumber Data Bidang CKJK)

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realiasi			Tahun 2024		
			2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase bangunan gedung kantor pemerintah yang tertata dengan baik	Persentase	65%	70%	75%	80%	80%	100%

* Data Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

1. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

- a. Persentase konstruksi bangunan gedung kantor pemerintah dalam kondisi baik .

Realisasi kinerja Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan realisasi kinerja tahun sebelumnya, dimana tahun 2024 terealisasi sebesar 78,67 % sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar 75,19% dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase penduduk berakses air minum layak adalah sebesar 78,67 %. Untuk pelayanan pokok air minum target tahun pada tahun 2024 sebesar 65.455 KK dan teralisasi sebesar 65.455 KK dari jumlah penduduk sebanyak 86.569 KK. sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase rumah tangga yang memiliki air bersih yang baik adalah meningkat sebesar 75,19 (78)%.

2. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Pada indikator kinerja konstruksi bangunan gedung kantor pemerintah dalam kondisi baik mencapai 80% mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2023 persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik sebesar 75% sehingga persentase peningkatan yang terjadi sebesar 5%. Peningkatan ini dikarenakan dalam rangka percepatan persiapan infrastruktur pekan olahraga provinsi kalimantan selatan yang akan dilaksanakan di Tanah Laut tahun 2025.

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator ini yaitu pembangunan gedung/bangunan/fasilitas lainnya berupa gedung/bangunan/fasilitas lainnya, yang terdiri dari beberapa kantor instansi pemerintah (SKPD), beberapa hibah pembangunan sarana pendukung kantor instansi vertikal/lainnya, puskesmas dan beberapa sarana dan prasarana lainnya

- Efisiensi Sasaran 6 (Meningkatnya penataan bangunan gedung kantor pemerintah)

Untuk sasaran 3 terdapat efisiensi anggaran sebesar 4,48 % sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.24
Efisiensi Anggaran Sasaran 3
(Sumber Data Bidang CKJK)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Capaian Kinerja	Efisiensi
Meningkatnya penataan bangunan gedung kantor pemerintah	Persentase bangunan gedung kantor pemerintah yang tertata dengan baik	92,12	96,60	4,48%

* Data Tahun 2024

SASARAN 7 : Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Sasaran meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang diukur dengan 1 (satu) indikator, yang realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.25
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 7 IKU DPUPRP
 (Sumber Data Bidang Tata Ruang)

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	Persentase	85,47	99,91	116,89

* Data Tahun 2024

3. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW sampai dengan tahun 2024 terealisasi sebesar sebesar 99,91% dari target awal 85,47% sehingga capaian kinerja persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW sebesar 116,89%.

Rumusan perhitungan dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Luas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW}}{\text{Luas permohonan pemanfaatan ruang}} \times 100\%$$

Pencapaian indikator kinerja persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten tahun 2024 terealisasi sebesar 99,91% dari yang ditargetkan sebesar 85,47%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten adalah sebesar 116,89%.

Sedangkan realisasi kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.26
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 7 IKU DPUPRP
 (Sumber Data Bidang Tata Ruang)

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realiasi			Tahun 2024		
			2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	Persentase	78	97	94,79	85,47	99,91	116,89

* Data Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

4. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi indikator kinerja persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten tahun 2024 realisasinya mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023, dimana tahun 2024 mampu terealisasi sebesar 99,91%, sedangkan tahun 2023 hanya terealisasi sebesar 94,79% dari yang masing-masing ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten mengalami peningkatan sebesar 5,12%.

5. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Realisasi yang dicapai tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023, dimana Pemerintah Kabupaten Tanah Laut hanya berupaya meningkatkan persentase kesesuaian tata ruang wilayah dengan RTRW Kabupaten dari target yang ada.

Dalam pencapaian indikator diatas permasalahan yang dihadapi bahwa beberapa pembangunan yang dilaksanakan sebelum Perda RTRW disahkan di tahun 2016.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya :

1. Membangun komitmen antar SKPD terkait agar segala bentuk perizinan yang menggunakan perencanaan Tata Ruang sesuai dengan Perda RTRW dan Perbub RDTR.
2. Mewajibkan setiap izin lingkungan yang diterbitkan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup wajib melakukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) terlebih dahulu sehingga setiap izin pemanfaatan sudah dapat dipastikan sesuai peruntukannya.
3. Mewajibkan setiap Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) harus mendapatkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) terlebih dahulu, sehingga peruntukan dapat dipastikan sesuai.
4. Melaksanakan pengecekan lapangan, apakah pembangunan dilapangan sudah sesuai dengan perda RTRW dan Perbub RDTR.

- Efisiensi Sasaran 3 (Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang)

Untuk sasaran 7 terdapat efisiensi anggaran sebesar 4,97 % sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.27
Efisiensi Anggaran Sasaran 3
(Sumber Data Bidang Tata Ruang)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Capaian Kinerja	Efisiensi
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	95,03	100	4,97

* Data Tahun 2024

1. Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja

Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja IKU Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, didukung dengan 12 program, 25 kegiatan dan 95 sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 635.401.932.987,- dan terealisasi sebesar Rp.588.767.260.162,- atau 92,66%.

Adapun realisasi program dan kegiatan serta jumlah SDM yang mendukung indikator kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.28
Realisasi Program, Kegiatan dan Jumlah SDM DPUPRP
(Sumber Data Bidang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)

No	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian %	SDM			
					PNS	PPPK	PTT	TTK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	SEKRETARIAT	17.359.891.939,00	15.601.543.742,00	98,97	10	0	17	4
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.359.891.939,00	15.601.543.742,00	98,97				
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	469.998.249,00	464.855.311,00	98,91				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.999.164,00	28.703.000,00	95,68				
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	439.999.085,00	436.152.311,00	99,13				
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.625.358.686,00	9.563.060.589,00	90,00				
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.515.359.600,00	9.472.226.600,00	90,08				
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	109.999.086,00	90.833.989,00	82,58				
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	23.844.406,00	20.906.200,00	87,68				
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	23.844.406,00	20.906.200,00	87,68				
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	335.550.000,00	242.535.000,00	72,28				

6	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	111.550.000,00	86.035.000,00	77,13				
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	224.000.000,00	156.500.000,00	69,87				
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	20.926.74.252,00	1.785.665.098,00	85,33				
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.998.835,00	1.6019.500,00	89,00				
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	932.742.117,00	785.930.477,00	84,26				
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.461.978,00	19.686.500,00	87,64				
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	54.976.172,00	43.544.600,00	79,21				
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	24.000.000,00	80,00				
13	Penyediaan Bahan/Material	10,000,000.00	10.000.000,00	100				
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.049.500.000,00	906.292.021,00	86,35				
15	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	1.995.150,00	1.792.000,00	89,82				
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	291.368.054,00	247.410.000,00	84,91				
16	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.000.000,00	49.760.000,00	74,71				
17	Pengadaan Mebel	224.768.054,00	197.650.000,00	87,94				
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.183.942.092,00	3.031.637.744,00	95,22				
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	418.000.000.00	328.735.760,00	78,64				
19	Penyediaan Jasa Peralatan dan Pelengkapan Kantor	0	0	0				
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.765.942.092,00	2.702.901.984,00	97,72				
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	337.156.200,00	245.473.800,00	72,81				
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.959.200,00	14.585.900,00	97,50				
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	184.057.500,00	148.391.900,00	80,62				
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.783.500,00	44.850.000,00	90,09				
24	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		0	0				
25	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	88.356.000	37.646.000	42,61				
II	BIDANG BINA MARGA	256.735.133.618,00	237.737.356.213,00	99,63	14	1	8	4
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	256.735.133.618,00	237.737.356.213,00	99,63				

9	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	256.735.133.618,00	237.737.356.213,00	99,63				
26	Penyusunan Rencana, Kebijakan Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	6.799.999.999,00	6.687.548.962,00	100,00				
27	Penggantian Jembatan	19.099.999.556,00	18.297.598.608,00	100,00				
28	Pembangunan Jalan	36.755.014.399,00	34.672.349.771,00	100,00				
29	Rekonstruksi Jalan	48.934.068.100,00	41.459.443.128,00	100,00				
30	Pelebaran Jalan Menuju Standar	3.498.903.404,00	3.272.307.023,00	100,00				
31	Pemeliharaan Rutin Jembatan	11.999.631.742,00	11.214.166.500,00	-				
32	Rehabilitasi Jembatan	5.099.999.998,00	4.668.301.288,00	100,00				
33	Pembangunan Jembatan	31.099.999.517,00	30.164.377.976,00	100,00				
34	Rehabilitasi Jalan	75.949.499.964,00	70.511.219.547,00	100,00				
35	Pemeliharaan Rutin Jalan	17.498.016.939,00	16.790.043.410,00	-				
III	BIDANG CIPTA KARYA DAN JASA KONSTRUKSI	204.463.176.753	195.473.753.623	95,60	10	0	7	0
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	28.176.685.087,00	26.017.510.908,00	100,00				
10	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	28.176.685.087,00	26.017.510.908,00	100,00				
36	Penyusunan Rencana, Kebijakan strategis dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.096.772.726,00	1.054.317.400,00	100,00				
37	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	5.298.386.363,00	5.074.131.642,00	100,00				
38	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	12.414.466.000,00	11.058.469.950,00	100,00				
39	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	9.367.059.998,00	8.830.591.916,00	100,00				
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	7.278.118.000,00	7.246.365.553,00	100,00				
11	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.278.118.000,00	7.246.365.553,00	100,00				
40	Penyediaan Sub Sistem Pengelahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	7.278.118.000,00	7.246.365.553,00	100,00				
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	23.811.288.625,00	220.22.345.080,00	100,00				
12	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	23.811.288.625,00	220.22.345.080,00	100,00				
41	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	22.913.000.000,00	21.173.060.080,00	100,00				

42	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	898.288.625,00	849.285.000,00	100,00				
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	144.897.085.041,00	139.974.576.098,00	100,00				
13	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	144.897.085.041,00	139.974.576.098,00	100,00				
43	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	144.897.085.041,00	139.974.576.098,00	100,00				
7	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	300.000.000,00	212.955.984,00	-				
14	Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	300.000.000,00	212.955.984,00	-				
44	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten / Kota	300.000.000,00	212.955.984,00	-				
IV	BIDANG SUMBER DAYA AIR	119.048.200.460,00	105.535.596.527,00	88,65	9	2	27	3
8	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	119.048.200.460,00	105.535.596.527,00	88,65				
15	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	92.413.585.517,00	81.333.700.435,00	88,01				
45	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	0	-	-				
46	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	631.696.256,00	570.857.200,00	90,37				
47	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	3.399.958.713,00	3.334.578.300,00	98,08				
48	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampungan Air Lainnya	0	-	-				
49	Normalisasi / Restorasi Sungai	16.903.061.147,00	15.968.090.262,00	94,47				
50	Pembangunan Breakwater	5.099.991.369,00	4.972.651.000,00	97,50				
51	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	15.698.718.699,00	10.969.892.565,00	69,88				
52	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	999.952.693,00	882.269.800,00	88,23				
53	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	11.499.674.390,00	10.817.165.450,00	94,06				
54	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai lainnya	28.292.917.230,00	26.689.686.300,00	94,33				
55	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten / Kota	1.000	-	-				
56	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	2.750.000.000,00	2.571.030.700,00	93,49				
57	Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya	2.867.740.312,00	474.595.833,00	16,55				

58	Rehabilitasi Tanggul Sungai	3.119.872.708,00	2.993.149.900,00	95,94				
59	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	1.000	-	-				
60	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	1.150.000.000,00	1.089.733.125,00	94,76				
16	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	26.634.614.943,00	24.201.896.092,00	90,87				
61	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	3.035.878.515,00	2.834.857.800,00	93,38				
62	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	3.099.664.819,00	2.911.797.500,00	93,94				
63	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	0	-	-				
64	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	0	-	-				
65	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	14.949.440.144,00	13.335.246.200,00	89,20				
66	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	999.920.293,00	996.875.392,00	99,70				
67	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Irigasi	0	-	-				
68	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	2.099.974.262,00	1.947.783.500,00	92,75				
69	Operasi Kelembagaan Pengelolaan Irigasi	249.737.110,00	205.764.500,00	82,39				
70	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	2.199.999.800,00	1.969.571.200,00	89,53				
V	BIDANG TATA RUANG	3.491.729.101,00	3.318.114.891,00	95,03	6	2	1	2
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3.491.729.101,00	3.318.114.891,00	95,03				
17	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	926.868.724,00	884.856.234,00	95,47				
71	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten / Kota	799.632.544,00	797.539.995,00	99,74				
72	Penetapan RDTR Kabupaten / Kota	127.236.180,00	87.316.239,00	68,63				
18	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	2.469.340.377,00	2.350.458.657,00	95,19				
73	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten / Kota	204.558.000,00	163.730.891,00	80,04				
74	Penyusunan RDTR Kabupaten / Kota	2.264.782.377,00	2.186.727.766,00	96,55				
19	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	95.520.000,00	82.800.000,00	86,68				
75	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	95.520.000,00	82.800.000,00	86,68				

VI	BIDANG PERTANAHAN	1.974.896.660	1.657.604.187	83,93	5	0	3	1
10	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	1.974.896.660	1.657.604.187	83,93				
20	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.347.165.868	1.179.151.987	87,53				
76	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	651.481.306	620.721.987	95,28				
77	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	695.684.562	558.430.000	80,27				
11	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	627.730.792	478.452.200	76,22				
21	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	627.730.792	478.452.200	76,22				
78	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	627.730.792	478.452.200	76,22				
VII	UPTD PERALATAN DAN PENGUJIAN MATERIAL KONSTRUKSI	5.694.289.513	5.241.394.887	92,05	8	0	12	1
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.694.289.513	5.241.394.887	92,05				
22	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.490.500,00	8.550.000 ,00	90,09				
79	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	9.490.500,00	8.550.000,00	90,09				
23	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah							
80	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	9.963.433,00	8.899.000,00	89,32				
81	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.991.523,00	12.655.300,00	84,42				
82	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.965.864,00	8.321.000 ,00	83,50				
83	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.999.531,00	9.107.000,00	91,07				
84	Penyediaan Bahan / Material	110.963.222,00	82.560.750,00	74,40				
85	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	634.031.500,00	466.302.602,00	73,55				
24	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.395.619.800,00	4.281.240.750,00	97,40				
86	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.762,00	-	-				
87	Pengadaan Alat Besar	4.200.600.020,00	4.105.000.000,00	97,72				
88	Pengadaan Mebel	9.990.000,00	9.990.000,00	100,00				
89	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.263.637,00	13.310.000,00	87,20				
90	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	169.761.381,00	152.940.750,00	90,09				

25	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	499.264.140,00	363.758.485,00	72,86				
91	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	132.000.000,00	102.343.700,00	77,53				
92	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Alat Berat	199.981.200,00	154.638.785,00	77,33				
93	Pemeliharaan Mebel	1.000.000,00	-	-				
94	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	119.270.000,00	59.890.000,00	50,21				
95	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	47.012.940,00	46.886.000,00	99,73				

* Data Tahun 2024

5. Indikator Kinerja Eselon 3 dan Eselon 4 Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

❖ BIDANG BINA MARGA

Sasaran, realisasi dan capaian indikator kinerja Eselon 3 pada Bidang Bina Marga tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.29
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Bina Marga
(Sumber Data Bidang Bina Marga)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian %
	Kepala Bidang Bina Marga				
1	Menurunnya Kerusakan Jalan	Panjang Jalan Rusak	475	475,43	0.99%
		Persentase panjang jalan yang memiliki konstruksi sesuai design	100	100	100%

* Data Tahun 2024

❖ Kepala Bidang Bina Marga

Sasaran : Menurunnya Kerusakan Jalan.

Pada sasaran meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan yang terintegrasi dan berkualitas untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa diukur melalui 2 indikator, yang realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.30
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pada Kabid Bina Marga
 (Sumber Data Bidang Bina Marga)

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Panjang Jalan Rusak	475	475,43	0.99%
2	Persentase panjang jalan yang memiliki konstruksi sesuai design	100	100	100%

* Data Tahun 2024

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

a. Panjang Jalan Rusak

Pencapaian indikator kinerja panjang jalan rusak yaitu Panjang Jalan kabupaten dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat (kondisi Tidak Mantap). Berdasarkan data teknis jalan Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 Panjang Jalan kabupaten dalam kondisi rusak ringan sebesar 128,64 Km dan Panjang Jalan kabupaten dalam kondisi rusak berat sebesar 346,79 Km. Total panjang jalan rusak (kondisi Tidak Mantap) sebesar 475,43 Km sehingga dapat dilihat capaian kinerja indikator kinerja panjang jalan rusak sebesar 100,09%.

b. Persentase panjang jalan yang memiliki konstruksi sesuai design

Pencapaian indikator kinerja Persentase panjang jalan yang memiliki konstruksi sesuai design tahun 2024 terealisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan, sehingga dapat dilihat capaian kinerja Persentase panjang jalan yang memiliki konstruksi sesuai design adalah 100%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.31
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Pada Kabid Bina Marga
 (Sumber Data Bidang Bina Marga)

No	Indikator Kinerja	Realiasi			Tahun 2024		
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian %
1	Panjang Jalan Rusak	592,668	484,48	554,55	475 KM	475,43	0.99 %
2	Persentase panjang jalan yang memiliki konstruksi sesuai design	100	100	100	100	100	100%

* Data Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

a. Panjang Jalan Rusak

Realisasi kinerja indikator Panjang Jalan Rusak tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023, dimana tahun 2021 Panjang Jalan Rusak 592,668Km, Tahun 2022 Panjang Jalan Rusak 484,48 Km, Tahun 2023 Panjang Jalan rusak 554,55 Km, dan tahun 2024 Panjang Jalan Rusak 475,43 Km, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Panjang Jalan Rusak yaitu 100,09% dari target yang ditetapkan.

b. Persentase panjang jalan yang memiliki konstruksi sesuai design

Pencapaian indikator kinerja Persentase panjang jalan yang memiliki konstruksi sesuai design tahun 2021-2024 terealisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan, sehingga dapat dilihat capaian kinerja Persentase panjang jalan yang memiliki konstruksi sesuai design adalah 100%.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

a. Panjang Jalan Rusak

Dari penjelasan diatas dapatlah dikatakan bahwa Panjang Jalan Rusak dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 terus menurun atau sepanjang 475,43 km dari panjang Jalan Kabupaten 1058,91 km. Hal ini dikarenakan Bidang Bina Marga telah melaksanakan Kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi dan rekonstruksi jalan kabupaten yang mengalami kerusakan.

b. Persentase panjang jalan yang memiliki konstruksi sesuai design

Dari penjelasan diatas dapatlah dikatakan bahwa Persentase panjang jalan yang memiliki konstruksi sesuai design tahun 2021-2024 terealisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan, sehingga dapat dilihat capaian kinerja Persentase panjang jalan yang memiliki konstruksi sesuai design adalah 100%. Hal ini dikarenakan Bidang Bina Marga telah melaksanakan pemeliharaan, rehabilitasi dan rekonstruksi jalan kabupaten sesuai design.

1. Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja.

Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja eselon 3 yang ada pada Bidang Bina Marga, didukung dengan 1 program, 1 kegiatan dan 10 sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 256.735.133.618,- dan terealisasi sebesar Rp. 237.737.356.213,- atau 99,63%.

Adapun realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan serta jumlah SDM yang mendukung indikator kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.32
Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Jumlah SDM Bidang Bina Marga
(Sumber Data Bidang Bina Marga)

No	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian %	SDM			
					PNS	PPPK	PTT	TTK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	BIDANG BINA MARGA				14	1	8	4
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	256.735.133.618,00	237.737.356.213,00	99,63				
1	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	256.735.133.618,00	237.737.356.213,00	99,63				
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	6.799.999.999,00	6.687.548.962,00	100,00				
2	Penggantian Jembatan	19.099.999.556,00	18.297.598.608,00	100,00				
3	Pembangunan Jalan	36.755.014.399,00	34.672.349.771,00	100,00				
4	Rekonstruksi Jalan	48.934.068.100,00	41.459.443.128,00	100,00				
5	Pelebaran Jalan Menuju Standar	3.498.903.404,00	3.272.307.023,00	100,00				
6	Pemeliharaan Rutin Jembatan	11.999.631.742,00	11.214.166.500,00	-				
7	Rehabilitasi Jembatan	5.099.999.998,00	4.668.301.288,00	100,00				
8	Pembangunan Jembatan	31.099.999.517,00	30.164.377.976,00	100,00				
9	Rehabilitasi Jalan	75.949.499.964,00	70.511.219.547,00	100,00				
10	Pemeliharaan Rutin Jalan	17.498.016.939,00	16.790.043.410,00	-				
J U M L A H		256.735.133.618,00	237.737.356.213,00	99,63				

* Data Tahun 2024

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja pada Bidang Bina Marga diantaranya :

1. Terbatasnya anggaran yang tersedia untuk mengakomodir program dan Kegiatan bidang Bina Marga.
2. Ketersediaan lahan dan akses lokasi yang cukup menyulitkan pelaksanaan pekerjaan.
3. Musim penghujan yang terjadi hampir sepanjang tahun sangat menghambat kelancaran pekerjaan.

4. Terdapat lahan atau Lokasi pekerjaan masih berstatus Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Kerusakan Jalan sebelum umur layannya tercapai dikarenakan Faktor Eksternal Seperti Bencana Alam, serta Muatan melebihi batas maksimal (tonase) pada kendaraan besar yang melewati Jalan Kabupaten menjadi salah satu penyebab kerusakan jalan.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

1. Perlu tersedianya anggaran yang mencukupi untuk bidang Bina Marga agar terakomodirnya Program dan Kegiatan bidang Bina Marga.
2. Melakukan pendekatan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian PUPR untuk dapat memperoleh pendanaan di luar APBD Tanah Laut.
3. Kerjasama dengan masyarakat dan aparat desa terkait permasalahan ketersediaan lahan pada saat konstruksi dilaksanakan
4. Memaksimalkan peran serta aparat desa dan masyarakat agar juga terlibat dalam pembangunan
5. Membuat metode kerja yang efektif dan maksimal serta menerapkan pengawasan ketat kepada pelaksana pekerjaan agar bekerja secara efektif dan maksimal
6. Melakukan pendekatan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian Lingkungan Hidup mengenai lahan atau Lokasi pekerjaan masih berstatus Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Mensosialisasikan serta Memaksimalkan peran serta aparat desa dan masyarakat mengenai kendaraan yang beroperasi di **jalan Kabupaten harus sesuai** dengan peruntukannya dan serta Muatan tidak melebihi batas maksimal (tonase).

Gambar 3.1
Rekonstruksi Jalan Kait-Kait Baru – Bentok Kampung



Gambar 3.2
Pembangunan Jalan Desa Tebing Siring (EX PTPN)



❖ **BIDANG CIPTA KARYA DAN JASA KONSTRUKSI**

Sasaran, realisasi dan capaian indikator kinerja Eselon 3 pada Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi
 (Sumber Data Bidang CKJK)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian %
Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi					
1	Meningkatnya rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih	3%	3	100
2	Meningkatnya rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	Persentase limbah yang terkelola dengan baik	3%	3	100
3	Meningkatnya saluran drainase yang terbangun	Persentase drainase jalan dalam kondisi baik	7,37%	7,37	100
4	Meningkatnya penataan bangunan gedung	Persentase konstruksi bangunan kedung kantor pemerintah dalam kondisi baik	80%	80	100
5	Meningkatnya kualitas jasa konstruksi	Persentase Jasa Konstruksi yang tertib	100%	100	100

* Data Tahun 2024

❖ **Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi**

Sasaran 1 : Meningkatnya Masyarakat Yang Mendapatkan Akses Air Bersih.

Pada sasaran meningkatnya rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih diukur melalui 3 indikator, yang realisasi dan capaian indikator tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.34
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Kabid CKJK
 (Sumber Data Bidang CKJK)

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih	65.455	65.455	100

* Data Tahun 2024

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

a. Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih.

Pencapaian indikator kinerja persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih pada tahun 2024 terealisasi sebesar 78 % dari yang ditargetkan sebesar 78%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase peningkatan cakupan rumah tangga dengan air bersih layak adalah 100%

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.35
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 1 Kabid CKJK
 (Sumber Data Bidang CKJK)

No	Indikator Kinerja	Realiasi (Akumulasi)			Pada Tahun 2024		
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih	69%	72%	75%	3%	3% (Akumulasi :78%)	100

* Data Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

a. Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih

Realisasi indikator kinerja persentase peningkatan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021 dengan total peningkatan yaitu sebesar 9%, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase peningkatan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan adalah meningkat sebesar 78%.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

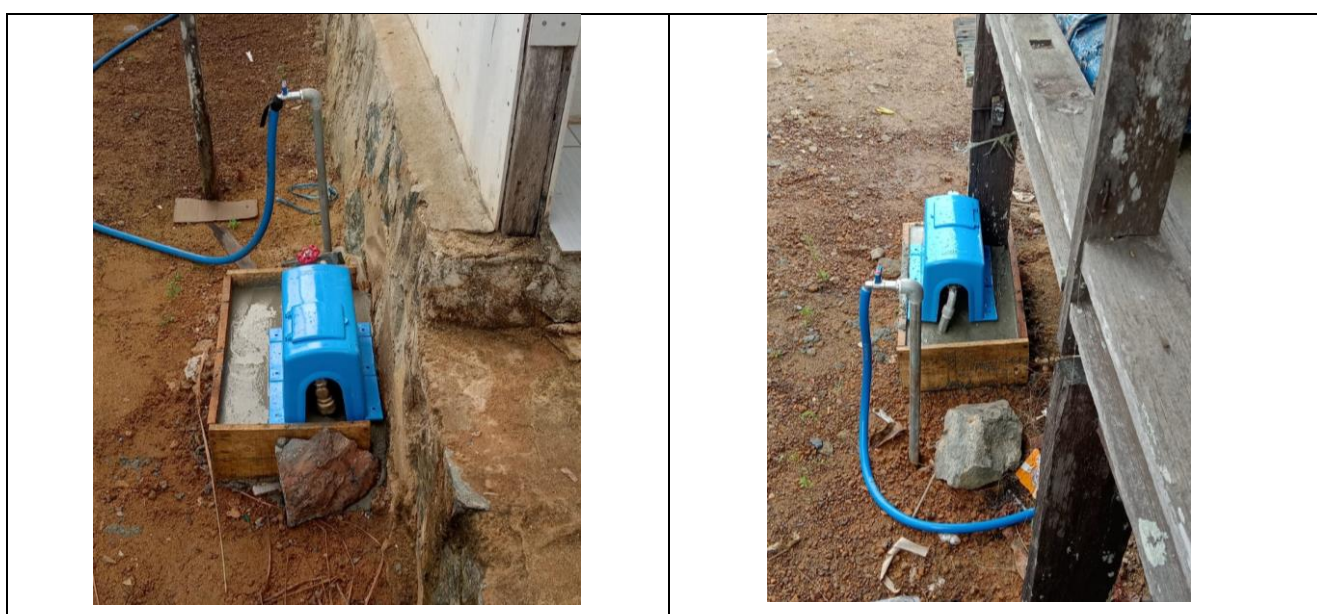
a. Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih.

Pada indikator kinerja persentase peningkatan cakupan rumah tangga dengan air bersih layak tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun

sebelumnya. Hal ini dimana kegiatan yang mampu terselesaikan dengan baik, dan adanya dukungan dana dari pusat melalui dana DAK serta instruksi Bupati terkait Penanganan Kekeringan dan Karhutla.

Kegiatan yang dilakukan pada indikator ini adalah yang pertama pembangunan SPAM dilaksanakan pada 4 kecamatan yaitu Kecamatan Kurau sebanyak 2 desa, Kecamatan Takisung sebanyak 2 desa. Dan yang kedua Pembangunan Sumur Bor yang dilaksanakan pada 11 kecamatan.

Gambar 3.3
Pemasangan Layanan Sambungan Rumah/Akses Air Bersih



Sasaran 2 : Meningkatnya Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi.

Pada sasaran meningkatnya rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi diukur melalui 1 indikator, yang realisasi dan capaian indikator tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.36
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Kabid CKJK
 (Sumber Data Bidang CKJK)

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase limbah yang terkelola dengan baik	3%	3%	100

* Data Tahun 2024

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

j. Persentase limbah yang terkelola dengan baik

Pencapaian indikator kinerja persentase peningkatan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi yang layak pada tahun 2024 terealisasi sebesar 78% dari yang ditargetkan sebesar 78%, sehingga dapat dilihat capaian kinerja persentase rumah tangga yang mendapat akses sanitasi yang layak meningkat dari tahun 2023 sebesar 3%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.37
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Kabid CKJK
 (Sumber Data Bidang CKJK)

No	Indikator Kinerja	Realiasi (Akumulasi)			Pada Tahun 2024		
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase limbah yang terkelola dengan baik	69	72	75	3%	3% (Akumulasi : 78%)	100

* Data Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

a. Persentase limbah yang terkelola dengan baik

Realisasi indikator kinerja Persentase limbah yang terkelola dengan baik pada tahun 2024 mencapai 78%, meningkat dengan total 9% dari target tahun 2021. Dimana sejak tahun 2021 hingga tahun 2024 terjadi penambahan 3% setiap tahun. Sehingga 2024 memiliki total 78%.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

a. Persentase limbah yang terkelola dengan baik

Pada indikator kinerja persentase peningkatan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi yang layak tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya kegiatan DAK Sanitasi dari Kementerian PUPR. Dengan adanya anggaran dari pusat melalui DAK Kementerian PUPR mampu mendukung dan merealisasikan kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah, dengan demikian dapat juga membantu perbaikan pengelolaan sanitasi masyarakat khususnya masyarakat perdesaan. Kegiatan yang dilakukan pada indikator ini adalah pembangunan tangki septik dengan menggunakan anggaran APBD pada Lokasi Desa Kebun raya, Pantai Harapan, Bati-Bati, Mekarsari, Banyu Irang, Batalang, Bati-Bati, Bawah Layung, Handil Babirik, Handil

Birayang Atas, Handil Negara, Jilatan, Kait-Kait Baru, Pasir Putih, Desa Salaman, Desa Ketapang.

Gambar 3.4
Pembangunan Septi Tank Komunal dan Individual



Sasaran 3 : Meningkatnya Saluran Drainase Yang Terbangun.

Pada sasaran meningkatnya saluran drainase yang terbangun diukur melalui 1 indikator, yang realisasi dan capaian indikator tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.38
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 Kabid CKJK
(Sumber Data Bidang CKJK)

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase drainase jalan dalam kondisi baik	7,37%	7,37%	100

* Data Tahun 2024

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Pencapaian Realisasi indikator kinerja persentase terbangunnya saluran drainase jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 sebesar 7,37% atau 8.299 dari total pembangunan drainase sepanjang 112.615 meter atau mencapai target sebesar 100%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.39
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 Kabid CKJK
 (Sumber Data Bidang CKJK)

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2024		
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase drainase jalan dalam kondisi baik	4,58	5,23	5,88	7,37%	7,37	100

* Data Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

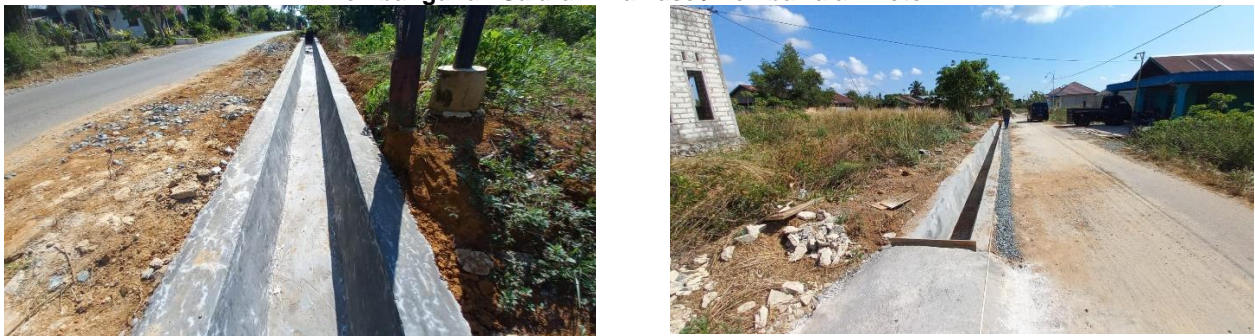
Realisasi indikator kinerja persentase drainase jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 sebesar 7,37%, meningkat dari tahun 2021 sebesar 4,58 hingga tahun 2023 sebesar 5,88%.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Pada indikator kinerja persentase drainase jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 mengalami peningkatan indikator kinerja persentase terbangunnya saluran drainase di Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2021 hingga tahun 2023 dengan total sebesar 7,37%. Peningkatan ini didukung melalui dana APBD legislatif atau Pokok Pikiran.

Kegiatan yang dilakukan pada indikator ini adalah pembangunan, pemasangan dan peningkatan drainase lingkungan.

Gambar 3.5
Pembangunan Saluran Drainase / Pembawa air Kotor



Sasaran 4 : Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung dan Penataan Bangunan dan Lingkungannya.

Pada sasaran meningkatnya penataan bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungannya diukur melalui 2 indikator, yang realisasi dan capaian indikator tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.40
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4 Kabid CKJK
 (Sumber Data Bidang CKJK)

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase konstruksi bangunan gedung kantor pemerintah dalam kondisi baik	80%	80 %	100

* Data Tahun 2024

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

- a. Persentase Persentase konstruksi bangunan kedung kantor pemerintah dalam kondisi baik.

Pencapaian indikator kinerja Persentase konstruksi bangunan kedung kantor pemerintah dalam kondisi baik sebesar 80% dari 116.042 bangunan Gedung kantor milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.41
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 Kabid CKJK
 (Sumber Data Bidang CKJK)

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2024		
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase konstruksi bangunan gedung kantor pemerintah dalam kondisi baik	65	70	75	80%	80	100

* Data Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

6. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

- b. Persentase konstruksi bangunan gedung kantor pemerintah dalam kondisi baik .

Realisasi indikator indikator kinerja persentase Persentase konstruksi bangunan gedung kantor pemerintah dalam kondisi baik mencapai 80% meningkat dengan total 15% dari target tahun 2021.

7. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

- a. Persentase konstruksi bangunan gedung kantor pemerintah dalam kondisi baik.

Pada indikator kinerja konstruksi bangunan gedung kantor pemerintah dalam kondisi baik mencapai 80% mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal

ini dikarenakan dalam rangka percepatan persiapan infrastruktur pekan olahraga provinsi kalimantan sealtan yang aka ndilaksanakan di tanah laut tahun 2025,

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator ini yaitu pembangunan gedung/bangunan/fasilitas lainnya berupa gedung/bangunan/fasilitas lainnya, yang terdiri dari beberapa kantor instansi pemerintah (SKPD), beberapa hibah pembangunan sarana pendukung kantor instansi vertikal/lainnya, puskesmas dan beberapa sarana dan prasarana lainnya

Gambar 3.6
Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten Tanah Lut



Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi.

Pada sasaran meningkatna kualitas sumber daya manusia jasa konsruksi diukur melalui 1 indikatoryang realisasi dan capaian indikator tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.42
Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Sasaran 5 Kabid CKJK
(Sumber Data Bidang CKJK)

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Jasa Konstruksi yang tertib	40	40	100%

* Data Tahun 2024

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

indikator kinerja persentase tertib jasa konstruksi tahun 2024 terealisasi sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 100% atau sebanyak 40 sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase tertib jasa konstruksi adalah 100%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.43
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 Kabid CKJK
 (Sumber Data Bidang CKJK)

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2024		
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Jasa Konstruksi yang tertib	0	0	0	100%	100%	100

* Data Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

1. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Realisasi pada indikator persentase tenaga jasa konstruksi yang tertib pada tahun 2024 tidak mengalami peningkatan atau mengalami penurunan dari tahun 2021 hingga 2023, dimana tahun 2024 sub kegiatan yang mengampu indikator persentase jasa konstruksi yang tertib yaitu pengawasan jasa konstruksi baru ada pada tahun anggaran 2024 atau tidak terealisasi ditahun sebelumnya, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase tenaga jasa konstruksi yang bersertifikat adalah sebesar 100%.

2. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Pada indikator kinerja persentase tenaga jasa konstruksi yang bersertifikat tahun 2024 tidak mengalami peningkatan atau mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan adanya perubahan sasaran indikator dan sub kegiatan yang baru pada tahun anggaran 2024.

Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja.

Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja eselon 3 yang ada pada Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi, didukung dengan 6 program, 6 kegiatan dan 13 sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 204.463.176.753,- dan terealisasi sebesar Rp. 195.473.753.623,- atau 92,30%.

Adapun realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan serta jumlah SDM yang mendukung indikator kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.47
Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Jumlah SDM Bidang CKJK

(Sumber Data Bidang CKJK)

No	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian %	SDM			
					PNS	PPPK	PPK	TTK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	BIDANG CIPTA KARYA DAN JASA KONSTRUKSI				10	0	7	0
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	28.176.685.087,00	26.017.510.908,00	100,00				
1	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	28.176.685.087,00	26.017.510.908,00	100,00				
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan strategis dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.096.772.726,00	1.054.317.400,00	100,00				
2	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	5.298.386.363,00	5.074.131.642,00	100,00				
3	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	12.414.466.000,00	11.058.469.950,00	100,00				
4	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	9.367.059.998,00	8.830.591.916,00	100,00				
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	7.278.118.000,00	7.246.365.553,00	100,00				
2	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.278.118.000,00	7.246.365.553,00	100,00				
5	Penyediaan Sub Sistem Pengelahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	7.278.118.000,00	7.246.365.553,00	100,00				
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	23.811.288.625,00	220.22.345.080,00	100,00				
3	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	23.811.288.625,00	220.22.345.080,00	100,00				
6	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	22.913.000.000,00	21.173.060.080,00	100,00				
7	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	898.288.625,00	849.285.000,00	100,00				
4	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	144.897.085.041,00	139.974.576.098,00	100,00				
4	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	144.897.085.041,00	139.974.576.098,00	100,00				
8	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	144.897.085.041,00	139.974.576.098,00	100,00				
5	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	300.000.000,00	212.955.984,00	70,99				
5	Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	300.000.000,00	212.955.984,00	70,99				

9	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten / Kota	300.000.000,00	212.955.984,00	70,99				
J U M L A H		204.463.176.753,00	195.473.753.623,00					

* Data Tahun 2024

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja pada Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi diantaranya :

1. Kondisi wilayah Kabupaten Tanah Laut yang luas dan pemukimannya tersebar dalam beberapa wilayah pelayanan pada 11 Kecamatan, sehingga mempengaruhi nilai investasi dengan layanan yang diberikan.
2. Kurangnya sumber air baku yang tersedia pada Kecamatan Kintap, Kecamatan Jorong, Kecamatan Takisung dan Kecamatan Panyipatan.
3. Luasnya wilayah pelayanan IKK Pelaihari dan IKK Bajuin, sehingga membutuhkan nilai investasi yang besar, salah satunya kondisi infrastruktur produksi dan distribusi IKK Bajuin yang telah melewati umur ekonomis.
4. Sedang dilakukannya review Perjanjian Kerja Sama / Nota Kesepakatan SPAM Regional Banjarkabula yang harus diperbaharui, dimana saat ini yang beroperasi hanya di Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Tambang Ulang, Kecamatan Kurau dan Kecamatan Bumi Makmur sedangkan Kecamatan Takisung sedang dalam tahap usulan untuk cakupan layanan.
5. Sedang dalam tahap serah terima asset IPLT Kabupaten Tanah Laut dengan BPPW Kalimantan Selatan yang pendanaannya bersumber dari APBN.

Solusi atau langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh dalam penerapan dan pencapaian SPM antara lain.

1. Mengupayakan tambahan anggaran selain yang bersumber dari APBD, yaitu dari APBN dan atau APBD Provinsi, DAK Bidang Air Minum, DAK Bidang Sanitasi, CSR, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Perbaikan Kinerja PDAM melalui Program NUWSP (National Urban Water Supply) dari World Bank, serta penyertaan modal pemerintah kepada perusahaan daerah air minum.
2. Melakukan studi kelayakan potensi air baku pada kecamatan yang kekurangan sumber air baku, agar didapatkan alternatifnya.
3. Melakukan fasilitasi serah terima asset pekerjaan NUWSP dengan Kementerian PUPR, agar dapat maksimal dalam melakukan pelayanan akses air minum bagi masyarakat Kabupaten Tanah Laut.

4. Menekan kepada pihak Pemerintah Provinsi agar segera mencari solusi kesepakatan, agar SPAM Regional Banjarbakula juga dapat melayani masyarakat Kecamatan Takisung.

❖ BIDANG SUMBER DAYA AIR

Kepala Bidang Sumber Daya Air

Sasaran : Meningkatnya infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air .

Pada sasaran meningkatnya infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air diukur melalui 3 indikator, yang realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.48
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pada Kabid SDA
(Sumber Data Bidang SDA)

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	71,11%	71,11%	100
2	Persentase DAS dalam kondisi baik	15,80%	15,54%	98,35
3	Persentase panjang pantai yang terlindungi	48,14%	49,76%	103,07%

* Data Tahun 2024

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

a. Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik

Pencapaian indikator kinerja persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik tahun 2024 terealisasi sebesar 71,11% dari yang ditargetkan sebesar 71,11%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase irigasi kabupaten berfungsi baik adalah 100%.

Rumusan perhitungan dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$P = \frac{A}{T}$$

Dimana:

A = Pencapaian indikator kinerja persentase jaringan irigasi berfungsi baik

T = Nilai Target

Persentase irigasi dalam kondisi baik didasarkan pada peraturan Menteri PUPR mengenai Indeks Kinerja Sistem Irigasi yang terdiri dari penilaian prasarana fisik, produktivitas tanam, sarana penunjang, organisasi personalia, dokumentasi, dan P3A.

b. Persentase Daerah Aliran Sungai dalam kondisi baik.

Pencapaian indikator kinerja persentase Daerah Aliran Sungai dalam kondisi baik tahun 2024 terealisasi sebesar 98,35% dari yang ditargetkan sebesar 15,80%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase Daerah Aliran Sungai dalam kondisi baik adalah 15,54%.

Rumusan perhitungan dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$P = \frac{A}{T}$$

Dimana:

A = Pencapaian indikator kinerja persentase DAS dalam kondisi baik

T = Nilai Target

Persentase DAS dalam kondisi baik terdiri dari penilaian jaringan sungai yaitu sungai induk, sekunder, tersier, dan drainase perkotaan.

c. Persentase panjang pantai yang terlindungi

Pencapaian indikator kinerja persentase panjang pantai yang terlindungi tahun 2024 terealisasi sebesar 49,76% dari yang ditargetkan sebesar 48,14%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air adalah 103,07%.

Rumusan perhitungan dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$P = \frac{A}{T}$$

Dimana:

A = Pencapaian indikator kinerja persentase panjang pantai yang terlindungi

T = Nilai Target

Persentase luas kawasan terdiri dari wilayah terdampak banjir dan daya rusak air pada wilayah pantai di Kabupaten Tanah Laut.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.49
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Pada Kabid SDA
(Sumber Data Bidang SDA)

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2024		
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	67,22%	68,08%	69,17%	71.11%	71,11%	100
2	Persentase DAS dalam kondisi baik	12,55%	13.13%	13.35%	15,80%	15.54%	98,35
3	Persentase panjang pantai yang terlindungi	46,00%	26.46%	46.21%	48,14%	49,76%	103,07

* Data Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

1. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

a. Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik

Realisasi indikator kinerja persentase irigasi kabupaten berfungsi baik tahun 2024 adalah sebesar 71,11% atau mencapai 100% dari target Renstra tahun 2024.

b. Persentase DAS dalam kondisi baik.

Realisasi indikator kinerja persentase DAS dalam kondisi baik tahun 2024 terealisasi sebesar 15.54% atau sebesar 98,35% dari target Renstra tahun 2024..

c. Persentase panjang pantai yang terlindungi.

Realisasi indikator kinerja persentase panjang pantai yang terlindungi tahun 2024 mampu melebihi dari target Renstra 49,76% atau terjadi pencapaian sebesar 103,07%

2. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Dari penjelasan terhadap 3 indikator di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 terjadi peningkatan realisasi dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023, hal ini disebabkan karena telah berjalannya kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan terhadap jaringan irigasi yang mengalami kerusakan pasca banjir dan gelombang pasang yang terjadi tahun 2021 yang lalu.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik meliputi:

1. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya sebanyak 15 dokumen;
2. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa sebanyak 12 dokumen;

3. Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya sebanyak 2 paket pekerjaan;
4. Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya sebanyak 14 paket pekerjaan;
5. Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa sebanyak 13 paket kegiatan;
6. Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan sebanyak 5 pekerjaan;
7. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa sebanyak 5 paket kegiatan.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator Persentase DAS Dalam Kondisi Baik adalah:

1. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai sebanyak 12 dokumen;
2. Normalisasi/Restorasi Sungai sebanyak 24 paket pekerjaan;
3. Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai sebanyak 2 paket kegiatan.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator Persentase Panjang Pantai yang Terlindungi adalah:

1. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai sebanyak 12 dokumen;
2. Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya sebanyak 6 paket kegiatan.
3. Pembangunan Breakwater sebanyak 1 paket pekerjaan.

1. Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja.

Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja eselon 3 yang ada pada Bidang Sumber Daya Air, didukung dengan 1 program, 2 kegiatan dan 26 sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 119.048.200.460,- dan terealisasi sebesar Rp. 105.535.596.527,- atau 89,05%.

Adapun realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan serta jumlah SDM yang mendukung indikator kinerja diatas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.50

**Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Jumlah SDM Bidang Sumber Daya Air
(Sumber Data Bidang SDA)**

No	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian %	SDM			
					PNS	PPPK	PTT	TTK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	BIDANG SUMBER DAYA AIR				9	2	27	3
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	119.048.200.460,00	105.535.596.527,00	89,05				
1	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	92.413.585.517,00	81.333.700.435,00	88,01				
1	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	0	-	-				
2	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	631.696.256,00	570.857.200,00	90,37				
3	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	3.399.958.713,00	3.334.578.300,00	98,08				
4	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampungan Air Lainnya	0	-	-				
5	Normalisasi / Restorasi Sungai	16.903.061.147,00	15.968.090.262,00	94,47				
6	Pembangunan Breakwater	5.099.991.369,00	4.972.651.000,00	97,50				
7	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	15.698.718.699,00	10.969.892.565,00	69,88				
8	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	999.952.693,00	882.269.800,00	88,23				
9	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	11.499.674.390,00	10.817.165.450,00	94,06				
10	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai lainnya	28.292.917.230,00	26.689.686.300,00	94,33				
11	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten / Kota	1.000	-	-				
12	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	2.750.000.000,00	2.571.030.700,00	93,49				
13	Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya	2.867.740.312,00	474.595.833,00	16,55				
14	Rehabilitasi Tanggul Sungai	3.119.872.708,00	2.993.149.900,00	95,94				
15	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	1.000	-	-				
16	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	1.150.000.000,00	1.089.733.125,00	94,76				

2	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	26.634.614.943,00	24.201.896.092,00	90,87				
17	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	3.035.878.515,00	2.834.857.800,00	93,38				
18	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	3.099.664.819,00	2.911.797.500,00	93,94				
19	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	0	-	-				
20	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	0	-	-				
21	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	14.949.440.144,00	13.335.246.200,00	89,20				
22	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	999.920.293,00	996.875.392,00	99,70				
23	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Irigasi	0	-	-				
24	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	2.099.974.262,00	1.947.783.500,00	92,75				
25	Operasi Kelembagaan Pengelolaan Irigasi	249.737.110,00	205.764.500,00	82,39				
26	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	2.199.999.800,00	1.969.571.200,00	89,53				
J U M L A H		119.048.200.460,00	105.535.596.527,00	89,05				

* Data Tahun 2024

- Kendala dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran meningkatnya infrastruktur sumber daya air yang berkualitas dan berfungsi dengan baik selama tahun 2024 yaitu :

1. Terbatasnya anggaran yang tersedia untuk mengatasi berbagai permasalahan ke-Sumber Daya Air-an di Kabupaten Tanah Laut.
2. Ketersediaan lahan dan akses lokasi yang cukup menyulitkan pada saat pelaksanaan pekerjaan.
3. Cuaca yang tidak dapat diprediksi cukup menghambat kelancaran pekerjaan.
4. Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat untuk memelihara jaringan irigasi secara mandiri
5. Kurangnya sumber daya manusia untuk operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
6. Berubahnya tata fungsi lahan mengakibatkan debit air yang semakin menurun pada jaringan irigasi terutama di musim kemarau.
7. Cuaca dan iklim ekstrim tidak menentu mengakibatkan terjadinya peningkatan kerusakan pada infrastruktur sumber daya air terutama yang diakibatkan oleh abrasi dan longsor.

8. Pemukiman warga yang merambah sempadan sungai dan pantai.
9. Rusaknya bagian hulu DAS mengakibatkan percepatan aliran air yang meninggikan tingkat daya rusak.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Kerjasama dengan masyarakat dan aparat desa terkait permasalahan ketersediaan lahan pada saat konstruksi dilaksanakan.
2. Memaksimalkan peran serta aparat desa dan masyarakat agar juga terlibat dalam pembangunan.
3. Membuat metode kerja yang efektif dan maksimal serta menerapkan pengawasan ketat kepada pelaksana pekerjaan agar bekerja secara efektif dan maksimal.
4. Memastikan adanya hibah tanah sesuai kebutuhan perencanaan konstruksi .
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat baik melalui penyuluhan ataupun pendekatan persuasif ke aparat terkait dan kelompok tani.
6. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang sumber daya air.
7. Menata daerah hulu dengan cara berkoordinasi baik secara vertikal maupun sektoral.
8. Memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya mitigasi bencana.
9. Perlunya aturan penerapan batas sempadan sungai dan pantai yang sesuai karakteristik daerah.
10. Perlunya kerjasama lintas sektoral menangani kerusakan DAS.

❖ BIDANG TATA RUANG

Sasaran, realisasi dan capaian indikator kinerja Eselon 3 pada Bidang Tata Ruang tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.51
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Bidang Tata Ruang
 (Sumber Data Bidang Tata Ruang)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Ketaatan pembangunan wilayah	Persentase Pembangunan yang sesuai dengan RTR yang telah ditetapkan	85,47	99,91	116.89

* Data Tahun 2024

❖ Kepala Bidang Tata Ruang

Sasaran : Meningkatnya Ketaatan pembangunan wilayah.

Pasa sasaran meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang diukur melalui 1 indikator, yang realisasi dan capaian indikator kinerja pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.52
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kabid Tata Ruang
(Sumber Data Bidang Tata Ruang)

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Pembangunan yang sesuai dengan RTR yang telah ditetapkan	85,47 %	99,91	116,89

* Data Tahun 2024

1. Perbandingan Realisasi dengan Target
 - a. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten.

Pencapaian indikator kinerja persentase pembangunan yang sesuai dengan RTR yang telah di tetapkan tahun 2024 mampu tersealisasi sebesar 99,91%, dari yang ditargetkan juga sebesar 85,47%, sehingga dapat dilihat bahwa peningkatan persentase pembangunan yang sesuai dengan RTR yang telah di tetapkan adalah 5,12%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.53
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kabid Tata Ruang
(Sumber Data Bidang Tata Ruang)

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2024		
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase pembangunan yang sesuai dengan RTR yang telah ditetapkan	78%	97%	94,79	85,47 %	99,91	116,89

* Data Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.
 - 1) Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan RTRW.

Realisasi indikator kinerja persentase pembangunan yang sesuai dengan RTR yang telah di tetapkan tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun

2023, dimana tahun 2024 terealisasi sebesar 99,91%, sedangkan tahun 2023 mampu terealisasi sebesar 94,79%, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi indikator persentase pembangunan yang sesuai dengan RTR yang telah ditetapkan adalah meningkat sebesar 5,12%.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

1) Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan RTRW.

Realisasi yang dicapai tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023, dimana Pemerintah Kabupaten Tanah Laut terus berupaya untuk dapat meningkatkan persentase pembangunan yang sesuai dengan RTR yang telah ditetapkan. Saat ini masih terdapat 0,09% pemanfaatan tata ruang yang dimohonkan oleh pelaku usaha/masyarakat yang tidak sesuai dengan Perda RTRW dan Perbub RDTR dikarenakan pembangunan yang akan dilaksanakan tidak sesuai dengan Perda RTRW dan Perbub RDTR yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024- 2043 sebagai pengganti Perda RTRW Nomor 3 Tahun 2016 tentang RTRW Tanah Laut Tahun 2016-2036. Sampai dengan tahun 2024 juga telah ditetapkan sebanyak 7 Peraturan Bupati tentang RDTR yaitu:

- 1). Peraturan Bupati Nomor No 23 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Pelaihari Tahun 2022-2042.
- 2). Peraturan Bupati Nomor No 24 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Taksiung Tahun 2022-2042, dan Perbub No 50 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perbub No 24 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Taksiung Tahun 2022-2042
- 3). Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Pelaihari Tahun 2022
- 4) Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Jorong.
- 5) Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2023 tentang Rencana Detail di Sekitar awasan Industri Jorong.

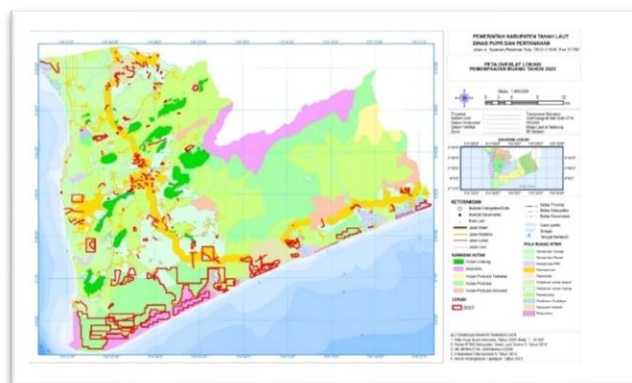
- 6) Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang RDTR Wilayah Perencanaan Tambang Ulang.
- 7) Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2024 tentang RDTR Wilayah Perencanaan Panyipatan.

Dalam pencapaian indikator diatas permasalahan yang dihadapi bahwa beberapa pembangunan yang dilaksanakan sebelum Perda RTRW disahkan di tahun 2016.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya :

- 1). Membangun komitmen antar SKPD terkait agar segala bentuk perizinan yang menggunakan perencanaan Tata Ruang sesuai dengan Perda RTRW dan Perbub RDTR.
- 2). mewajibkan setiap izin lingkungan yang diterbitkan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup wajib mendapatkan pertek tata ruang terlebih dahulu sehingga setiap izin pemanfaatan sudah dapat dipastikan sesuai peruntukannya.
- 3). Mewajibkan setiap Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) harus mendapatkan pertek tata ruang terlebih dahulu, sehingga peruntukan dapat dipastikan sesuai.
- 4). Melaksanakan pengecekan lapangan, apakah pembangunan dilapangan sudah sesuai dengan perda RTRW dan Perbub RDTR.

Gambar 3.8
Peta Overlay Lokasi Pemanfaatan Ruang Tahun 2023



Gambar 3.9
Peta Overlay Lokasi Pemanfaatan Ruang Tahun 2024



1. Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja.

Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja eselon 3 dan pejabat fungsional tertentu yang ada pada Bidang Tata Ruang, didukung dengan 1 program, 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp 3.491.729.101,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.318.114.891,- atau 95,03%.

Adapun realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan serta jumlah SDM yang mendukung indikator kinerja diatas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.54
Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Jumlah SDM Bidang Tata Ruang
(Sumber Data Bidang Tata Ruang)

No	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian %	SDM			
					PNS	PPPK	PTT	TTK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	BIDANG TATA RUANG	3.491.729.101,00	3.318.114.891,00	95,03	6	2	1	2
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3.491.729.101,00	3.318.114.891,00	95,03				
1	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	926.868.724,00	884.856.234,00	95,47				
1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten / Kota	799.632.544,00	797.539.995,00	99,74				
2	Penetapan RDTR Kabupaten / Kota	127.236.180,00	87.316.239,00	68,63				
2	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	2.469.340.377,00	2.350.458.657,00	95,19				
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten / Kota	204.558.000,00	163.730.891 ,00	80,04				
4	Penyusunan RDTR Kabupaten / Kota	2.264.782.377,00	2.186.727.766,00	96,55				
3	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	95.520.000,00	82.800.000,00	86,68				

5	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	95.520.000,00	82.800.000,00	86,68				
TOTAL		3.491.729.101,00	3.318.114.891,00	95,03				

* Data Tahun 2024

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja Eselon 3 Bidang Tata Ruang selama tahun 2024 diantaranya sebagai berikut :

1. Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki khususnya tenaga teknis bidang tata ruang.
2. Kurangnya informasi data dalam penyusunan RTRW dan RDTR untuk perencanaan dari masing-masing SKPD terkait dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang wilayah.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan diatas diantaranya sebagai berikut :

1. Memaksimalkan kegiatan yang ada sehingga kegiatan lainnya mampu terlaksana seluruhnya.
2. Meningkatkan koordinasi dengan semua skpd yang terjalin dengan baik dan lebih intens.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk aktif dalam kegiatan konsultasi publik terkait penyusunan dokumen terkait penyelenggaraan penataan ruang.
4. Memaksimalkan staf PNS dan tenaga PTT yang ada dalam melaksanakan kegiatan.
5. Memberikan pelatihan mengenai GIS dan ilmu ketataruangan agar dapat semakin meningkatkan kinerja PNS dan PTT yang ada.

❖ **BIDANG PERTANAHAN**

Sasaran, realisasi dan capaian indikator kinerja Eselon 3 pada Bidang Pertanahan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.55
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Bidang Pertanahan
 (Sumber Data Bidang Pertanahan)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian %
	Kepala Bidang Pertanahan				
1	Meningkatnya penyelesaian konflik tanah	Persentase konflik tanah yang terfasilitasi	100%	100%	100

2	Meningkatnya ketertiban tanah pemda	Persentase aset tanah pemda yang tertib (Crosscutting dengan BPKAD)	50 %	50 %	50
---	-------------------------------------	---	------	------	----

* Data Tahun 2024

❖ Kepala Bidang Pertanahan

Sasaran 1 : Meningkatkan Inventarisasi dan Mediasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Perkara Pertanahan.

a. Persentase Penyelesaian sengketa/konflik pertanahan Tahun 2023

$$\frac{\text{Jumlah sengketa tanah termediasi}}{\text{Jumlah permohonan fasilitasi sengketa tanah}} \times 100\%$$

$$= \frac{3 \text{ Berita Acara}}{3 \text{ Berita Acara}} \times 100\% = 100\%$$

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 sama dengan tahun 2023 dimana untuk target Jumlah permohonan fasilitasi sengketa tanah 3 Berita Acara dan untuk Realisasi Jumlah sengketa tanah termediasi adalah 3 Berita Acara dengan capaian persentase sebesar 100 %.

b. Persentase terkosolidasinya tanah di Kabupaten Tanah Laut

$$\frac{\text{Jumlah aset tanah pemda yang tertib}}{\text{Jumlah aset tanah pemda}} \times 100\% = \frac{1 \text{ Dokumen}}{1 \text{ Dokumen}} \times 100\%$$

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 sama dengan tahun 2023 dimana untuk target dokumen Jumlah aset tanah pemda yang tertib adalah 1 Dokumen dan untuk Realisasi dokumen Jumlah aset tanah pemda yang tertib yang dilaksanakan adalah 1 Dokumen yaitu Dokumen Inventarisasi Aset Pemerintah Daerah pada Kecamatan Jorong dengan capaian persentase sebesar 100 %.

Pada sasaran Meningkatkan penyelesaian konflik tanah dan Meningkatkan ketertiban tanah pemda diukur melalui 2 indikator, yang realisasi dan capaian indikatornya pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.56
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Kabid Pertanahan
 (Sumber Data Bidang Pertanahan)

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian%
1	Persentase konflik tanah yang terfasilitasi	100%	100%	100

* Data Tahun 2024

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Pencapaian indikator kinerja Persentase konflik tanah yang terfasilitasi pada tahun 2024 mampu terealisasi sebesar 100% dari yang ditargetkan juga sebesar 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja Persentase konflik tanah yang terfasilitasi adalah 100%

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.57
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Kabid Pertanahan
 (Sumber Data Bidang Pertanahan)

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2024		
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase konflik tanah yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100

* Data Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

2. Perbandingan Realisasi dengan Raelisasi Terkait.

Realisasi indikator kinerja persentase penyelesaian sengketa tanah pada tahun 2024 tidak mengalami peningkatan/penurunan. Jika dibandingkan pada tahun 2023, dimana tahun 2024 mampu terealisasi sebesar 100%, sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar 100% dari yang ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase penyelesaian sengketa tanah adalah tetap.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Pada Pada indikator kinerja Persentase konflik tanah yang terfasilitasi realisasi kerjanya tidak mengalami peningkatan/penurunan, dimana kegiatan yang dilaksanakan pada indikator ini yaitu dapat melaksanakan fasilitasi permasalahan Permasalahan Lahan Permasalahan sebagai berikut :

- 1.) Permasalahan Lahan PT. SSJ dengan Masyarakat Desa KANDANGAN Lama Kecamatan Panyipatan.

- 2.) Permasalahan Lahan PT. CAHAYA BORNEO SUKSES AGROSINDO (CBSA), PT. INHUTANI I dan Masyarakat Desa Sabuhur Kecamatan Jorong dengan Berita Acara Nomor : 500.17.4.1/ 558 /TNH/DPUPRP.
- 3.) Permasalahan Lahan PT. CAHAYA BORNEO SUKSES AGROSINDO (CBSA), PT. INHUTANI I dan Masyarakat Desa Sabuhur Kecamatan Jorong dengan Berita Acara Nomor : 500.17.4.1/ 559 /TNH/DPUPRP

Gambar 3.10

Kegiatan Terkait Penyusunan Dokumen Inventarisasi Konflik dan Perkara Pertanahan



Sasaran 2 : Meningkatkan ketertiban tanah pemda

Persentase terkosolidasinya tanah di Kabupaten Tanah Laut

$$\frac{\text{Jumlah Dokumen Konsolidasi Tanah yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Dokumen Konsolidasi Tanah di Kab.Tanah Laut}} \times 100\% = \frac{2 \text{ Dokumen}}{2 \text{ Dokumen}} \times 100\% = 100\%$$

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 sama dengan tahun 2023 dimana untuk target dokumen aset tanah pemda yang tertib adalah 1 Dokumen dan untuk Realisasi dokumen aset tanah pemda yang tertib yang dilaksanakan adalah 1 Dokumen yaitu Dokumen Inventarisasi Aset Pemerintah Daerah pada Kecamatan Jorong dengan capaian persentase sebesar 100 %.

Pada sasaran meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah diukur melalui 1 indikator, yang realisasi dan capaian indikator kinerja kepala bidang pertanahan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.58
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Kabid Pertanahan
(Sumber Data Bidang Pertanahan)

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase aset tanah pemda yang tertib (Crosscutting dengan BPKAD)	50 %	50 %	100%

* Data Tahun 2024

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

a. Persentase aset tanah pemda yang tertib (Crosscutting dengan BPKAD).

Pencapaian indikator kinerja Persentase aset tanah pemda yang tertib (Crosscutting dengan BPKAD) pada tahun tahun 2024 mampu terealisasi sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja Persentase aset tanah pemda yang tertib (Crosscutting dengan BPKAD) adalah 100%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.59
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Kabid Pertanahan
(Sumber Data Bidang Pertanahan)

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2024		
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase aset tanah pemda yang tertib (Crosscutting dengan BPKAD)	100%	100%	100%	50%	50%	100%

* Data Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Persentase indikator kinerja Persentase konflik tanah yang terfasilitasi pada tahun 2024 tidak mengalami peningkatan/penurunan. Jika dibandingkan pada tahun 2023, dimana tahun 2024 mampu terealisasi sebesar 100%, sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar 100% dari yang ditargetkan, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Persentase konflik tanah yang terfasilitasi adalah tetap.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

a. Persentase konflik tanah yang terfasilitasi.

Pada indikator kinerja Persentase konflik tanah yang terfasilitasi Persentase aset tanah pemda yang tertib (Crosscutting dengan BPKAD) pada tahun 2024 realisasinya tidak sama dengan tahun 2023 yaitu 50% dari yang masing-masing ditargetkan. Kegiatan pada indikator ini adalah terkait Inventarisasi data aset bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dimana pada tahun 2024 dengan target 1 dokumen yaitu 1 Dokumen inventarisasi Asset Pemda pada Kecamatan Jorong telah terealisasi 50% dengan capaian kinerja 100%. dan pada tahun 2023 dengan target 2 dokumen pada 1 dokumen untuk Inventarisasi aset di Kecamatan Kurau dan 1 Dokumen Program Pendaftaran Tanah Sistemati Lengkap (PTSL) di Kabupaten Tanah Laut telah terealisasi 100% dengan capaian kinerja 100%

Gambar 3.11

Kegiatan Terkait Penyusunan Dokumen Inventarisasi Aset Pemerintah Daerah



4. Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja.

Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja eselon 3 yang ada pada Bidang Pertanahan, didukung dengan 2 program, 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 1.974.896.660,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.657.604.187,- atau 83,93%.

Adapun realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan serta jumlah SDM yang mendukung indikator kinerja diatas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.60
Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Jumlah SDM Bidang Pertanahan
 (Sumber Data Bidang Pertanahan)

No	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian %	SDM			
					PNS	PPPK	PTT	TTK
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	BIDANG PERTANAHAN	1.974.896.660,00	1.657.604.187,00	83,93				
1	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	1.974.896.660,00	1.657.604.187,00	83,93				
1	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.347.165.868,00	1.179.151.987,00	87,53				
1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	651.481.306,00	620.721.987,00	95,28				
2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	695.684.562,00	558.430.000,00	80,27				
2	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	627.730.792,00	478.452.200,00	76,22				
2	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	627.730.792,00	478.452.200,00	76,22				
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	627.730.792,00	478.452.200,00	76,22				
J U M L A H		1.974.896.660,00	1.657.604.187,00	83,93				

* Data Tahun 2024

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pencapaian indikator diatas diantaranya:

1. Kurangnya personil tenaga ukur dilapangan
2. Kurangnya data terkait lokasi asset dan fasilitas umum pemerintah daerah
3. Pemilik tanah tidak dapat membuktikan penguasaan tanahnya.
4. Masih Kurangnya fasilitas transportasi dalam melaksanakan kegiatan ke lapangan
5. Kurangnya sarana penunjang kegiatan dilapangan

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan diatas diantaranya :

1. Menambah personil tenaga ukur dilapangan
2. Berkoordinasi terkait data asset pemerintah daerah dengan BPKAD dan Kantor BPN Kabupaten Tanah Laut.
3. Perlu bantuan pengecekan data melalui kantor pertanahan ATR/BPN
4. Menambah fasilitas transportasi dilapangan.
5. Perlu ditambahnya sarana penunjang buat kegiatan lapangan.

6. Memaksimalkan PNS, PTT dan TTK yang dimiliki.

❖ UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi

Sasaran, realisasi dan capaian indikator kinerja pada UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.61
Realisasi dan Indikator UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi
(Sumber Data UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian %
	Kepala UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi				
1	Meningkatnya retribusi jasa sewa alat berat pengujian material konstruksi	Jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat laboratorium uji material konstruksi (perubahan)	Rp. 95.000.000,	Rp. 169.545.000,	178
		Jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat berat	Rp. 405.000.000,	Rp. 512.935.000,	127
2	Meningkatnya pemenuhan saranan dan prasarana UPTD Peralatan dan Pengujian material konstruksi	Jumlah alat berat yang dipenuhi	2	2	100
		Jumlah alat material konstruksi yang dipenuhi	2	2	100

* Data Tahun 2024

❖ Kepala UPTD Peralatan Pengujian Material Konstruksi

Sasaran : Meningkatkan Retribusi Sewa Alat Uji Material Konstruksi.

Pada sasaran meningkatnya retribusi sewa alat uji material konstruksi diukur melalui 1 indikator, yang realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 3.62
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kepala UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi
(Sumber Data UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi)

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat Lab. uji material konstruksi	Rp. 95.000.000	Rp. 169.545.000,	178
2	Jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat berat	Rp. 405.000.000	Rp. 512.935.000,	127

* Data Tahun 2024

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.
 - a. Pencapaian indikator kinerja jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat lab. uji material konstruksi tahun 2024 pendapatan terealisasi sebesar

Rp.169.545.000,- dari yang ditargetkan yaitu sebesar Rp. 95.000.000,- sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat Lab. uji material konstruksi adalah 178% dari total pendapatan yang ditargetkan.

- b. Pencapaian indikator kinerja jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat tahun 2024 pendapatan terealisasi sebesar Rp. 246.550.000,- dari yang ditargetkan yaitu sebesar Rp. 512.935.000,- sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat uji material konstruksi adalah 127% dari total pendapatan yang ditargetkann.

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.63
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kepala UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi
 (Sumber Data UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi)

No	Indikator Kinerja	Realisasi		2024		
		2022	2023	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat uji material konstruksi	Rp. 82.410.000	Rp. 135.345.000	Rp. 95.000.000	Rp. 169.545.000	178
2	Jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat berat	Rp. 461.788.500	Rp. 246.550.000	Rp. 405.000.000	Rp. 512.935.000	127

* Data Tahun 2024

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

- a. indikator kinerja jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat uji material konstruksi tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan sekali hampir mencapai dua kali lipat dari yang ditargetkan, dan dibandingkan tahun sebelumnya dimana tahun 2023 hanya mampu terealisasi sebesar Rp. 135.345.000,- dari yang ditargetkan sebesar Rp. 95.000.000,-, sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 82.410.000,- dari yang ditarget pendapatan sebesar Rp.100.750.000,- sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat lab uji material konstruksi tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 adalah meningkat dan melampaui target sebesar Rp. 74.545.000,- atau sebesar 78%.
- b. Realisasi indikator kinerja jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat berat tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya,

dimana tahun 2023 mampu terealisasi sebesar Rp. 246.550.000,- dari yang ditargetkan sebesar Rp. 405.000.000,-, sedangkan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 461.778.500,- dari yang ditargetkan sebesar Rp. 178.575.000,-, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi kinerja jumlah penerimaan retribusi atas jasa sewa alat berat tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 adalah cukup tinggi, dan melampaui target pendapat sebesar Rp. 107.935.000,- atau sebesar 46,60 %.

3. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Dari analisa diatas dapat dijelaskan bahwa peningkatan realisasi kinerja tahun 2024 adanya peningkatan retribusi daerah adalah:. Pertama adanya kegiatan sosialisasi tentang retribusi di 11 Kecamatan, dan adanya Edaran Bupati Tanah Laut, yang menghimbau kepada masyarakat secara luas untuk dapat memanfaatkan aset daerah yang ada pemerintahan kabupaten Tanah Laut., Kedua adanya peningkatan kerjasama interen DPUPRP bahwa setiap pekerjaan konstruksi yang dilakukan khususnya di Kabupaten Tanah Laut, agar dalam melakukan uji material konstruksinya supaya dilakukan di UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi (PPMK) DPUPRP, dan Ketiga Pelaksanaan Perda No 1 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi menjadi dasar tentang tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta Perubahan Tarif Retribusi Terbaru dari Pemakaian Alat Berat Dan Alat Laboratorium Uji Material Konstruksi Milik Pemerintah Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Dan Pertanahan

❖ Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi.

Sasaran 1 : Melakukan Pemeliharaan Sarana Dan Prasanana Alat Uji Material Konstruksi

Pada sasaran melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana alat uji material konstruksi diukur melalui 1 indikator, yang realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.64
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Kasubbag Tata Usaha
UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi
 (Sumber Data UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi)

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah alat uji material konstruksi yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	71 Buah	71 Buah	100
2	Jumlah pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Unit	1 Unit	100
3	Jumlah fasilitasi pelayanan administrasi UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi	200 Layanan	366 Layanan	183
	Jumlah SDM UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi yang bersertifikat	21 Orang	13 Orang	62

* Data Tahun 2024

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

- a. Pencapaian indikator kinerja Jumlah alat uji material konstruksi yang dipelihara dan berfungsi dengan baik tahun 2024 terealisasi sebanyak 71 buah dari yang ditargetkan juga sebanyak 71 Buah, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah sarana dan prasaran alat berat dan alat uji material konstruksi yang dipelihara dan berfungsi dengan baik adalah 100%.
- b. Pencapaian indikator kinerja Jumlah pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya tahun 2024 terealisasi sebanyak 1 Unit dari yang ditargetkan juga sebanyak 1 unit, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja umlah pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya adalah 100%.
- c. Pencapaian indikator kinerja Jumlah fasilitasi pelayanan administrasi UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi tahun 2024 terealisasi sebanyak 366 layanan dari yang ditargetkan juga sebanyak 20 layanan, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja dari Jumlah fasilitasi pelayanan administrasi UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi yang tercapai adalah 183%.
- d. Pencapaian indikator kinerja Jumlah SDM UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi yang bersertifikat tahun 2024 terealisasi sebanyak 21 orang dari yang ditargetkan juga sebanyak 13 orang, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja dari upaya peningkatan SDM UPTD PPMK DPUPRP, yang tercapai adalah 62%.

Sasaran 2 : Melakukan Pelayanan Administrasi UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi

Pada sasaran melakukan pelayanan administrasi **UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi** diukur melalui 4 indikator, yang realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Sedangkan untuk realisasi kinerja dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.65
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Kasubbag TU
UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi
 (Sumber Data UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi)

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2023		
		2021	2022	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah sarana dan prasarana alat berat dan alat uji material konstruksi yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	71 Buah	71 Buah	71 Buah	71 Buah	100
2	Jumlah pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100
3	Jumlah fasilitasi pelayanan administrasi UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi	180 layanan	198 layanan	200 layanan	366 Layanan	183
4	Jumlah SDM UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi yang bersertifikat	0 orang	9 orang	21 orang	15 Orang	71

* Data Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

1. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

- a. Realisasi indikator kinerja jumlah sarana dan prasarana alat berat dan alat uji material konstruksi yang dipelihara dan berfungsi dengan baik mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 realisasi kinerjanya adalah meningkat sebanyak 71 Buah, sehingga dapat dilihat bahwa realisasi pada kinerja sarana dan prasarana alat berat dan alat uji material konstruksi yang dipelihara dan berfungsi dengan baik adalah tetap yaitu sebanyak 71 buah. (jumlah tahun 2022 dan 2023 sama tidak ada penambahan alat), baru ada penambahan alat di Tahun 2024, namun jaminan masa pemeliharaan masih garansi dari penyedia untuk Excavator Long Arm, dan Truk Towing (Self Loader Mini)
- b. Realisasi indikator kinerja jumlah pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, adalah sebanyak 1 unit pemeliharaan bangunan parkir alat berat dengan angka realisasi sebesar Rp.46.886.000,- (Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)., Realisasi ini tidak dapat dibandingkan karena pada tahun sebelumnya pada tahun 2022, dan 2023 tidak dianggarkan

- c. Realisasi indikator kinerja Jumlah fasilitasi pelayanan administrasi UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi mulai tahun 2022 telah menargetkan 118 dan tercapai sebanyak 180 Layanan dan pada tahun 2023 ditingkatkan menjadi 180 Layanan, dan terealisasi sebanyak 198 layanan, sehingga pada tahun 2024 ditargetkan menjadi 200 layanan dan akhirnya realisasi kinerja layanan tahun 2024 sebanyak 366 layanan, meningkat drastis bahkan melebihi target sebanyak 166 layanan.
- d. Realisasi indikator kinerja SDM UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi yang bersertifikat, ada yang telah bersertifikat sejak tahun 2016, dan dianggap kadaluarsa, karena tidak melakukan uji kompetitif sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan oleh kemnaker, sehingga pada tahun 2022, indikator kinerja SDM UPTD dianggap 0, namun pada tahun 2023 diusulkan lagi untuk pembinaan operator sebanyak 10 orang dengan sertifikat Kemnaker, dan yang berhasil lulus sebanyak 9 orang operator alat berat. Sehingga hal ini menjadi indikator kinerja SDM UPTD PPMK kembali meningkat yaitu realisasi pada kinerja SDM UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi yang bersertifikat sebanyak 9 orang. Dan pada tahun 2024 diikuti lagi pelatihan bagi analisis uji material konstruksi sebanyak 6 orang dan berhasil meraih sertifikasi dibidang pengujian aspal dan beton, jadi jumlah SDM yang memiliki Sertifikat sampai dengan tahun 2024 sebanyak 15 orang, dari akhir target semua SDM yang ada di UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi DPUPRP sebanyak 21 orang.

2. Analisa Peningkatan/Penurunan Realisasi Kinerja

- a. Pada indikator jumlah alat berat dan alat uji material konstruksi yang dipelihara dan berfungsi dengan baik tetap sama dengan tahun sebelumnya, hal ini di karenakan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 tidak ada penambahan/pembelian alat yang baru, sehingga pemeliharaan rutin dilaksanakan pada alat yang sudah ada, sehingga jumlah alat berat dan alat uji material konstruksi yang dimiliki UPTD PPMK yaitu tetap sebanyak 71 buah
- b. Pada indikator jumlah pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, adalah sebanyak 1 unit pemeliharaan bangunan parkir alat berat dengan angka realisasi sebesar Rp.46.886.000,- (Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)., dengan adanya fasilitas parkir

- yang memadai, dapat menjamin keamanan aset alat berat milik pemerintah daerah dengan baik sehingga mengurangi kerugian negara akan resiko kehilangan.
- c. Pada indikator jumlah fasilitasi pelayanan administrasi UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, sehingga jumlah fasilitasi pelayanan administrasi UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi yang UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi sebanyak 198 layanan pada tahun 2024 ditargetkan menjadi 200 layanan dan akhirnya realisasi kinerja layanan tahun 2024 sebanyak 366 layanan, meningkat drastis bahkan melebihi target sebanyak 166 layanan.
- d. Pada indikator kinerja SDM UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi yang bersertifikat terjadi peningkatan dari tahun 2022 (pada tahun 2022 0 orang), karena pada tahun 2023 telah dilaksanakannya kegiatan pembinaan diklat dan sertifikasi operator alat berat di Balikpapan, dan 9 (sembilan) orang berhasil lulus. Sehingga SDM yang bersertifikat pada UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi, yaitu tetap sebanyak 9 orang.

Tabel 3.66
Alat Uji UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi
 (Sumber Data UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi)

No	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Pembuatan/ Pembelian	Jumlah Barang/ Register
1	2	3	4
1	Diamond Core Bit 4"	2013	1 Pcs
2	Core Drilling Test	2013	1 Pcs
3	Sand Cone Test Set	2014	2 Set
4	Balance (0,01 gram sensitivity)	2014	2 Pcs
5	Balance (0,1 gram sensitivity)	2014	3 Pcs
6	Oven Laboratorium	2018	1 Pcs
7	Los Angeless Abrassion Machine	2018	1 Pcs
8	Copression Machine ASTM C-39	2018	1 Pcs
9	Dynamic Cone Penetrometer	2018	1 Pcs
10	Digital Balance (Cap 30Kg x 1 gr)	2018	1 Pcs
11	Digital Balance (Cap 10Kg x 0,1 gr)	2018	1 Pcs
12	Cetrifuge Exctractor Test	2013	1 Pcs
13	Filter Paper Low Ash	2013	4 Pak
14	Marshall Test Set	2013	1 Set
15	Hydrometer Analysis Test Set	2013	2 Set
16	Motorised Laboratory CBR Test Set	2013	1 Set

No	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Pembuatan/ Pembelian	Jumlah Barang/ Register
17	Shrinkage Limit Test Set	2013	1 Set
18	Proving Ring Penetrometer	2013	1 Pcs
19	Termometer Metal	2013	2 Pcs
20	Specific Gravity and Absorption Of Coarse Agregat Test Set	2013	1 Set
21	Hand Operated Liquid Limit Test Set	2013	4 Set
22	Concrete Test Hammer	2013	1 Pcs
23	Absorption Of Fine Aggregate Test Set	2014	1 Set
24	Compaction Test Set	2014	2 Set
25	Wash Bottle	2014	2 Pcs
26	Bottle Roller	2014	2 Pcs
27	Stopwatch	2014	1 Pcs
28	Vernier Caliper	2014	4 Pcs
29	Plastic Limit Test Set	2014	1 Pcs
30	Concrete Cube Mold (15 X 15 X 15 cm)	2014	5 Pcs
31	Slump Test Set	2014	2 Pcs
32	Brass Round Sieve 3"	2014	1 Pcs
33	Brass Round Sieve 2 1/2"	2014	2 Pcs
34	Brass Round Sieve 2"	2014	2 Pcs
35	Brass Round Sieve 1 3/4"	2014	2 Pcs
36	Brass Round Sieve 1 1/4"	2014	2 Pcs
37	Brass Round Sieve 1"	2014	2 Pcs
38	Brass Round Sieve 3/4"	2014	2 Pcs
39	Brass Round Sieve 1/2"	2014	2 Pcs
40	Brass Round Sieve 3/8"	2014	2 Pcs
41	Brass Round Sieve 1/4"	2014	2 Pcs
42	Brass Round Sieve No.4"	2014	3 Pcs
43	Brass Round Sieve No 8"	2014	2 Pcs
44	Brass Round Sieve No.10"	2014	2 Pcs
45	Brass Round Sieve No.12"	2014	1 Pcs
46	Brass Round Sieve No.16"	2014	2 Pcs
47	Brass Round Sieve No.30"	2014	2 Pcs
48	Brass Round Sieve No.40"	2014	2 Pcs
49	Brass Round Sieve No.50"	2014	2 Pcs
50	Brass Round Sieve No.80"	2014	2 Pcs
51	Brass Round Sieve No.100"	2014	2 Pcs
52	Brass Round Sieve No.200"	2014	2 Pcs
53	Brass Round Sieve Pan and Cover	2014	2 Pcs

No	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Pembuatan/ Pembelian	Jumlah Barang/ Register
54	Piknometer Agregat Halus	2022	1 Pcs
55	Piknometer Filler (Semen)	2022	1 Pcs
56	Piknometer Tanah	2022	1 Pcs

* Data Tahun 2024

Gambar 3.12
Kegiatan yang dilakukan pada UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi



**PENGOPERASIAN ALAT BERAT
MOTOR GRADER 330**



**PENGOPERASIAN ALAT BERAT
EXCAVATOR LONG ARM**



**PENGOPERASIAN ALAT BERAT
TOWING/ MINI SELF LOADER**



**PENGOPERASIAN ALAT BERAT
VIBRATING ROLLER 10 TON**



**PENGOPERASIAN ALAT BERAT
THREE WHEEL ROLLER 8 TON**



**PENGOPERASIAN ALAT BERAT
TANDEM ROLLER 4,5 TON**



**PENGOPERASIAN ALAT BERAT
BABY ROLLER**



**PENGOPERASIAN ALAT BERAT
WHEEL LOADER**

**PENGOPERASIAN ALAT BERAT
EXCAVATOR MINI**



PENGOPERASIAN DUMP TRUCK



**PENGOPERASIAN ALAT BERAT
RUMMER**



**PENGOPERASIAN FLAT BED TRUCK
WITH CRANE**



PENGUJIAN DESAIN MIX LPA A





PENGUJIAN CORE DRILL



PENGUJIAN DESAIN MIX LPA B

4. Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja.

Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja eselon 3 dan yang ada pada UPT Peralatan, didukung dengan 1 program, 4 kegiatan dan 17 sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 10.589.173.453,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.886.394.122,- atau 93,36%.

Adapun realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan serta jumlah SDM yang mendukung indikator kinerja diatas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.67
Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Jumlah SDM UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi
 (Sumber Data UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Jumlah SDM		
					PNS	PTT	TTK
1	2	3	4	5	6	7	8
I	UPTD PERALATAN DAN PENGUJIAN MATERIAL KONSTRUKSI	10.589.173.453,00	9.886.394.122,00	93,36			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.589.173.453,00	9.886.394.122,00	93,36			
1	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.490.500,00	8.550.000 ,00	90,09			
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	9.490.500,00	8.550.000,00	90,09			

2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	789.915.073,00	587.845.652,00	74,42			
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.963.433,00	8.899.000,00	89,32			
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.991.523,00	12.655.300,00	84,42			
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.965.864,00	8.321.000,00	83,50			
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.999.531,00	9.107.000,00	91,07			
6	Penyediaan Bahan / Material	110.963.222,00	82.560.750,00	74,40			
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	634.031.500,00	466.302.602,00	73,55			
3	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.395.619.800,00	4.281.240.750,00	97,40			
8	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.762,00	-	-			
9	Pengadaan Alat Besar	4.200.600.020,00	4.105.000.000,00	97,72			
10	Pengadaan Mebel	9.990.000,00	9.990.000,00	100			
11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.263.637,00	13.310.000,00	87,20			
12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	169.761.381,00	152.940.750,00	90,09			
4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	499.264.140,00	363.758.485,00	72,86			
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	132.000.000,00	102.343.700,00	77,53			
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Alat Berat	199.981.200,00	154.638.785,00	77,33			
15	Pemeliharaan Mebel	1.000.000,00	-	-			
16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	119.270.000,00	59.890.000,00	50,21			
17	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	47.012.940,00	46.886.000,00	99,73			
J U M L A H		10.589.173.453,00	9.886.394.122,00	93,36			

* Data Tahun 2024

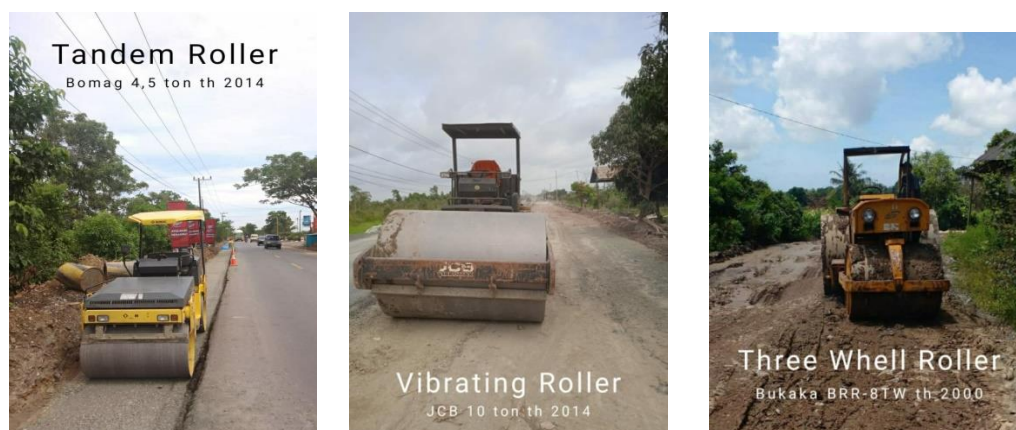
Beberapa alat berat yang dimiliki UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi sampai dengan tahun 2024, tidak ada penambahan pembelian yang baru pada anggaran perubahan tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.68
Jenis Alat Berat dan Alat Lainnya Pada UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi
(Sumber Data UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi)

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang/ Register	Keterangan
1	2	3	
1	Truck Crane Toyota Diesel 3,4	1 Unit	1988
2	Tyre Roller KR 200	1 Unit	1988
3	Whell Loader	1 Unit	1991
4	Baby Roller Dynamic RS 600D	1 Unit	1995
5	Dump Truck RR Izuzu ELF 120 PS	1 Unit	1995
6	Motor Grader MG 230	1 Unit	1995
7	Baby Roller Meiwa MG-7	1 Unit	2000
8	Three Whell Roller Bukaka BRR-8TW	1 Unit	2000
9	Motor Grader MG 330	1 Unit	2014
10	Plate Compactor Tacom	1 Unit	2014
11	Rammer Tacom Tv 85DF	1 Unit	2014
12	Vibrating Roller TCB 10 Ton	1 Unit	2014
13	Tandem Roller Bomag 4,5 ton	1 Unit	2014
14	Excavator Mini CAT 305 5E2	1 Unit	Pembelian 2021
15	Genset ST IF 12000T3	1 Unit	Pembelian 2021
16	Truk Towing / Self Loader Mini	1 Unit	Pembelian 2024
17	Excavator Long Arm	1 Unit	Pembelian 2024

* Data Tahun 2024

Gambar 3.13
Beberapa Alat Berat Pada UPT Peralatan





Dalam pencapaian indikator diatas ada beberapa permasalahan yang dihadapi UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi diantaranya :

- 1) Target Pendapatan dari tahun ke tahun terus meningkat, dengan kondisi peralatan yang dimiliki UPTD sebagian besarnya rusak berat, dikarenakan tahun produksi alat yang cukup tua (1989,1995, dan 2014) terkadang untuk pemeliharaan kesulitan dalam mencari suku cadang di pasaran.
- 2) Semakin banyaknya perusahaan-perusahaan swasta yang menyediakan jasa rental alat berat yang lebih maju, meskipun dengan harga bersaing .
- 3) Dari Perhitungan usia ekonomis dari 15 alat berat yang dimiliki UPTD, yang biasa digunakan oleh jasa rental swasta, ada 2 Alat yang memiliki kriteria sisi umur ekonomis yaitu Excavacator Mini (Trakindo CAT) tahun 2021, sehingga diperlukan penambahan jenis alat berat setiap tahunnya, pada tahun 2024 telah diadakan Excavator Long Arm. Namun hal ini masih diperlukan alat lainnya yang baru seperti Vibro Roller, dan Grader yang segera diadakan pada tahun 2025 dan 2026
- 4) Sumber Daya Manusia (Operator) memerlukan standar sertifikat sebagai operator, K3, dan keterampilan teknis pendukung lainnya.
- 5) Pola Pengelolaan UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi, sebagai ujung tombak dari peningkatan asli pendapatan daerah pada DPUPRP kabupaten Tanah laut, terkendala pada beberapa kebijakan yang harus dipenuhi sebagai unit penguji memerlukan adanya standar akreditasi yang harus dipenuhi, dan berdasarkan kondisi laboratorium yang ada saat cukup memprihatinkan baik dari segi sarana dan prasarana maupun SDM /analisis yang belum memenuhi persyaratan teknis.

Upaya-upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan sosialisasi retribusi daerah, dan menjalin kerja sama dengan beberapa pekerja, dan pemilik perkebunan untuk dapat lebih memanfaatkan peralatan yang ada di UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi
- 2) Menyusun program peremajaan alat berat, dan terus mengusulkan ke Pemerintah daerah, untuk penambahan alat berat disetiap tahun anggaran.
- 3) Melakukan koordinasi dengan PUPR Regional Kalimantan Selatan yang ada di Banjarmasin, untuk dapat melaksanakan pelatihan bagi operator dan tenaga teknis lainnya.
- 4) Menyusun langkah – langkah, pembenahan laboratorium, manajemen dalam rangka pengusulan untuk meraih akreditasi laboratorium
- 5) Melakukan pembinaan pada SDM yang ada, mengikutkan mereka pada program-program pelatihan teknis yang terstandar kemnaker, KAN, dan lembaga uji lainnya

Dalam pencapaian indikator diatas ada beberapa permasalahan yang dihadapi UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi pada sub unit Lab Uji Material Konstruksi diantaranya :

- 1) Sumber daya manusia (Personil laboratorium material konstruksi) yang tersedia sangat terbatas dan tidak bersertifikat dikarenakan kebijakan mutasi pegawai yang bersertifikat tidak ditugaskan lagi pada unit laboratorium.
- 2) Biaya pemeliharaan untuk kalibrasi alat uji dilaksanakan terbatas, dan perlu pengembangan lebih jauh lagi yang memerlukan kerja sama dengan lembaga yang terstandar
- 3) Pemanfaatan alat uji terbatas, dikarenakan model alat versi lama, dan pemahaman pemakaian variasi alat uji rendah
- 4) Operasional pelayanan pengujian dilapangan terkendala dengan sarana dan prasarana operasional (mobil) untuk keperluan pengujian.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi sebagai berikut :

- 1) Mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimiliki, dan meminjam tenaga teknis ahli khusus pengujian, sehingga kesetaraan hasil uji laboratorium valid,
- 2) Melakukan pemeliharaan pada beberapa alat uji laboratorium dengan bekerjasama

dengan Pengelolaan Peralatan Teknik Sipil, yang ada di Banjarbaru

- 3) Memaksimalkan pemanfaatan alat yang biasa digunakan, dan memotivasi SDM Laboratorium untuk selalu belajar secara mandiri terhadap penggunaan alat laboratorium dan bekerja sama dengan Politeknik Negeri Tanah Laut dalam penambahan wawasan pada unit laboratorium material konstruksi.
- 4) Pengaturan jadwal operasional dilapangan yang lebih teratur, antara sub unit kerja peralatan dan sub unit kerja laboratorium dan memanfaatkan kendaraan operasional kepala UPTD, yang dipelihara dengan mengadakan perawatan kendaraan yang dimodifikasi agar dapat mencapai daerah-daerah pengujian yang strategis.

6) Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2024

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2024 adalah sebesar **Rp. 608.767.318.044,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 564.565.364.070,-** atau **92,74 %**, dengan rincian alokasi belanja dan realisasi belanja sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja hibah. Alokasi anggaran belanja operasi Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar Rp. 216.509.904.978,- dengan realisasi sebesar Rp. 200.639.431.918,- atau 92,67 % dengan rincian:

- 1) Belanja Pegawai dengan pagu anggaran Rp. 10.515.359.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.472.226.600,- atau 90,08 %.
- 2) Belanja Barang Jasa dengan pagu Anggaran Rp. 192.253.727.196,- dengan realisasi sebesar Rp. 178.244.995.018,- atau 92,71 %
- 3) Belanja Hibah dengan pagu anggaran Rp. 13.740.818.182,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.922.210.300,- atau 94,04 %.

2. Belanja Modal

Belanja Modal terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi dan belanja

modal aset tetap lainnya. Alokasi anggaran belanja modal adalah sebesar Rp. 392.257.413.066,- Realisasi belanja modal sebesar Rp. 363.925.932.152,- atau 92,78 %. Dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Belanja Modal Tanah dengan pagu anggaran Rp. 5.477.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.139.900.500,- atau 57,33 %.
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan pagu anggaran Rp. 5.543.590.998,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.263.486.329,- atau 94,95 %.
- 3) Belanja Modal Gedung dan bangunan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 131.181.494.241,- dengan realisasi sebesar Rp. 127.553.231.347,- atau 97,23 %.
- 4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dengan pagu anggaran Rp. 249.977.283.727,- dengan realisasi sebesar Rp. 227.906.813.976,- atau 91,17 %
- 5) Belanja Modal Aset Lainnya dengan pagu anggaran Rp. 78.044.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 62.500.000,- atau 80,08 %

2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

Tabel 3.69
Rincian Anggaran berdasarkan Program dan Sasaran Dinas PUPRP
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024
(Sumber Data Dinas Pekerjaan. Umum Penataan Ruang dan Pertnahan Kab. Tanah Laut)

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan			
		Uraian	Anggaran	Realisasi	Presentase
			Rp	Rp	%
	SEKRETARIAT				
1	Meningkatnya kinerja tata kelola Perangkat daerah yang akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.054.181.444,00	20.842.938.629,00	90,96
		<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	469.998.249,00	464.855.311,00	98,91
		<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	10.625.358.686,00	9.563.060.589,00	90,00
		<i>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	23.844.406,00	20.906.200,00	87,68
		<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	345.040.500,00	251.085.000,00	
		<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	2.882.589.593,00	2.373.51.750,00	

		<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	4.686.987.854,00	4.528.65.750,00	
		<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	3.183.942.092,00	3.031.637.744,00	95,22
		<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	836.417.340,00	609232.285,00	
	BIDANG BINA MARGA				
2	Meningkatnya infrastruktur jalan yang berkualitas	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	256.735.133.618,00	237.737.356.213,00	99,63
		<i>Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</i>	256.735.133.618,00	237.737.356.213,00	99,63
	BIDANG CKJK				
3	Meningkatnya rumah tangga dengan akses air minum layak dan sanitasi layak	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	28.176.685.087,00	26.017.510.908,00	100
		<i>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</i>	28.176.685.087,00	26.017.510.908,00	100
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	7.278.118.000,00	7.246.365.553,00	100
		<i>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	7.278.118.000,00	7.246.365.553,00	100
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	23.811.288.625,00	220.22.345.080,00	100
		<i>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	23.811.288.625,00	220.22.345.080,00	100
4	Meningkatnya penataan bangunan gedung kantor pemerintah	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	144.897.085.041,00	139.974.576.098,00	100
		<i>Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</i>	144.897.085.041,00	139.974.576.098,00	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	300.000.000,00	212.955.984,00	70,99
		<i>Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</i>	300.000.000,00	212.955.984,00	70,99
	BIDANG SDA				
5	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air yang berkualitas dan berfungsi dengan baik	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	119.048.200.460,00	105.535.596.527,00	89,05
		<i>Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	92.413.585.517,00	81.333.700.435,00	88,01
		<i>Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	26.634.614.943,00	24.201.896.092,00	90,87

BIDANG TATA RUANG					
6	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3.491.729.101,00	3.318.114.891,00	95,03
		<i>Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</i>	926.868.724,00	884.856.234,00	95,47
		<i>Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>	2.469.340.377,00	2.350.458.657,00	95,19
		<i>Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota</i>	95.520.000,00	82.800.000,00	86,68
BIDANG PERTANAHAN					
7	Meningkatnya pemanfaatan tanah daerah.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	1.974.896.660,00	1.657.604.187,00	83,93
		<i>Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	1.347.165.868,00	1.179.151.987,00	83,93
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	627.730.792,00	478.452.200,00	76,22
		<i>Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</i>	627.730.792,00	478.452.200,00	76,22

* Data Tahun 2024

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 – 2024

Pada Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Melaksanakan 12 program dengan 21 kegiatan dan 58 sub kegiatan, sedangkan Pada tahun anggaran 2024 program dan kegiatan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut yaitu berjumlah 12 program dengan 25 kegiatan dan 95 sub kegiatan, sehingga di tahun 2024 ada sedikit penambahan jumlah kegiatan dan sub kegiatan karena penyesuaian numenklatur Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021 pemutakhiran.

A. Tahun 2024

Pada tahun anggaran 2024 program dan kegiatan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut yaitu berjumlah 11 program dengan 21 kegiatan dan 78 sub kegiatan yang terbagi kedalam 5 bidang dan 1 sekretariat. Sedangkan program dan kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut berjumlah 1 program dengan 4 kegiatan dan 17 sub kegiatan.

B. Tahun 2023

Pada tahun anggaran 2023 program dan kegiatan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut yaitu

berjumlah 11 program dengan 17 kegiatan dan 49 sub kegiatan yang terbagi kedalam 5 bidang dan 1 sekretariat. Sedangkan program dan kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut berjumlah 1 program dengan 4 kegiatan dan 9 sub kegiatan. Program dan kegiatan yang ada pada masing – masing bidang, sekretariat dan Unit Pelaksana Teknis pada Tahun 2024 dan Tahun 2023 bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.70
Perbandingan Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut
Pada Tahun Anggaran 2023 dan 2024

(Sumber Data Dinas Pekerjaan. Umum Penataan Ruang dan Pertnahan Kab. Tanah Laut)

No	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan Beserta Pagu Anggaran (Rp.)			
		2023		2024	
		SEKRETARIAT			
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		43,942,846		
a.		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43,942,846	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21,999,264	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.999.164
2.		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21,943,582	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	439.999.085
b.		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,589,257,336	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
1.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,559,845,999	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.515.359.600
2.		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	29,412,336	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	109.999.086
c.			0	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	23.844.406
1.			0	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	23.844.406
d.		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		
1.			-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	111.550.000
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	224.000.000

d.		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,651,343,995	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
1.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,995,782	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.998.835
2.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	732,168,493	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	932.742.117
3.				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.461.978
4.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57,236,720	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	54.976.172
5.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000
6.		Penyediaan Bahan/Material	10,000,000	Penyediaan Bahan/Material	10.000.000
7.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	840,943,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.049.500.000
				Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	1.995.150
e.				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1.				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.600.000
2.				Pengadaan Mebel	224.768.054
f.		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,766,124,514	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	439,048,274	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	418.000.000
2.		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-
3.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,327,076,240	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.765.942.092
g.		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	231,848,000		
1.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11,016,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan	14.959.200
2.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	220,832,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	184.057.500
3.				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.783.500
4.		Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-
5.				Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	88.356.000
		BIDANG BINA MARGA			

B.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		216,167,830,106		256.735.133.618
a.		Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	216,167,830,106	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	256.735.133.618
1.		Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	3,415,900,000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	6.799.999.999
2.		Pembangunan Jalan	34,702,240,543	Pembangunan Jalan	36.755.014.399
3.		Pelebaran Jalan Menuju Standar	1,514,067,409	Pelebaran Jalan Menuju Standar	3.498.903.404
4.		Rekonstruksi Jalan	73,666,378,107	Rekonstruksi Jalan	48.934.068.100
5.		Rehabilitasi Jalan	60,799,093,655	Rehabilitasi Jalan	75.949.499.964
6.		Pemeliharaan Rutin Jalan	12,559,874,736	Pemeliharaan Rutin Jalan	17.498.016.939
7.		Pembangunan Jembatan	7,643,828,035	Pembangunan Jembatan	31.099.999.517
8.		Penggantian Jembatan	12,708,118,397	Penggantian Jembatan	19.099.999.556
9.		Rehabilitasi Jembatan	475,092,000	Rehabilitasi Jembatan	5.099.999.998
10.		Pemeliharaan Rutin Jembatan	8,683,237,224	Pemeliharaan Rutin Jembatan	17.498.016.939
	BIDANG CIPTA KARYA DAN JASA KONSTRUKSI				
C.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		50,309,587,356		
a.		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	50,309,587,356	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
1.		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	-	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1.096.772.726
2.		Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	381,818,182		
3.		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	6,148,454,547	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan	12.414.466.000
4.		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	28,779,314,627	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	5.298.386.363
5.		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	15,000,000,000	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	9.367.059.998
D.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		4,637,200,000		
a.		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	4,637,200,000	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
1.		Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	4,637,200,000	-	-

				Penyediaan Sub Sistem Pengelahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	7.278.118.000
E.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		25,752,469,834		
b.		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	25,752,469,834	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
1.		Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	-		
2.		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	25,752,469,834	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	22.913.000.000
				Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	898.288.625
F.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		126,142,920,841		
c.		Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	126,142,920,841	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
1.		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	126,142,920,841	-	
				Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	144.897.085.041
G.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		415,000,000		
e.		Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	415,000,000	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
1.		Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	415,000,000	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
2.		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	-	-	
				Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten / Kota	300.000.000
	BIDANG SUMBER DAYA AIR				
H.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		88,539,525,514		
a.		Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	51,462,796,407		

				Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	
				Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	631.696.256
				Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten / Kota	1.000
				Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya	2.867.740.312
				Rehabilitasi Tanggul Sungai	3.119.872.708
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	1.000
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	1,518,693,289	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	1.150.000.000
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	2,348,196,560	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	2.750.000.000
		Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	-		
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	13,216,088,484	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	15.698.718.699
		Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	25,649,938,531	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai lainnya	28.292.917.230
		Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	-	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	11.499.674.390
		Normalisasi/Restorasi Sungai	6,134,898,385	Normalisasi / Restorasi Sungai	16.903.061.147
		Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	2,524,926,101	-	3.399.958.713
		Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	70,055,057	-	-
				Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampungan Air Lainnya	0
		Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	-		
				Pembangunan Breakwater	5.099.991.369
				Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	999.952.693
b.		Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	37,076,729,099		

				Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	95.520.000
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten / Kota	204.558.000
				Penyusunan RDTR Kabupaten / Kota	2.264.782.377
	BIDANG PERTANAHAN				
J.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		1,170,848,401		
a.		Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,170,848,401	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
1.		Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	349,956,000	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	651.481.306
2.		Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	820,892,401	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	695.684.562
K.	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		1,907,756,359		
a.		Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	1,907,756,359	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	
1		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	1,907,756,359	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	627.730.792
	UPT PERALATAN				
L.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		657.607.824		
a.		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	91,092,000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
1.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	91,092,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
		-	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	9.490.500
b.		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	74,985,041	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
1.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9,987,312	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.963.433
2.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4,997,729	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.991.523
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.965.864
3.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.999.531
				Penyediaan Bahan / Material	110.963.222
4.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	634.031.500

				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.762
				Pengadaan Alat Besar	4.200.600.020
				Pengadaan Mebel	9.990.000
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.263.637
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	169.761.381
c.		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16,167,200	-	-
1.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	-	-
2.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16,167,200	-	-
d.		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	475,365,583		
1.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	134,432,100		132.000.000
2.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	227,740,123		199.981.200
3.		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung Kantor dan bangunan Lainnya	113,193,360	Pemeliharaan Mebel	1.000.000
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	119.270.000
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	47.012.940

* Data Tahun 2023 dan 2024

Untuk Ringkasan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.71
Perbandingan APBD Tahun 2023 dan 2024
(Sumber Data Dinas Pekerjaan. Umum Penataan Ruang dan Pertaanan Kab. Tanah Laut)

No	2023		2024	
1.	Belanja operasi	151.656.495.812	Belanja operasi	216.509.904.978
2.	Belanja modal	381.988.507.743	Belanja modal	392.257.413.066
	Total	533.645.003.555	Total	608.767.318.044

* Data Tahun 2023 dan 2024

Pada tabel diatas dapat terlihat bahwa adanya kenaikan anggaran pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023, hal ini dimana tahun 2024 banyak kegiatan – kegiatan yang fokus pada lanjutan perbaikan dan pembangunan infrastruktur baik Gedung Perkantoran pemkab maupun Hibah Gedung Instansi Vertikal, Jalan, jembatan, dan Sumber Daya Air

Pada Tahun 2024 juga merupakan tahun pertama Rentra Transisi Tahun 2024 - 2026.

4. Efisiensi Anggaran per Sasaran Strategis

1. Sasaran 1 (Meningkatkan Infrastruktur Jalan yang Berkualitas)

Untuk sasaran 1 dari 2 indikator dan 1 Program pengampu terdapat efisiensi anggaran sebesar 7, 03%, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.72
Efisiensi Anggaran Sasaran 1
(Sumber Data Bidang Bina Marga)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Capaian Kinerja	Efisiensi
Meningkatkan Infrastruktur Jalan yang Berkualitas	Persentase jalan dalam kondisi baik	92,60%	99,63%	7, 03%

* Data Tahun 2024

2. Sasaran 2 (Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Perangkat Daerah Yang Akutabel)

Untuk sasaran 2 dari 1 indikator dan 1 Program pengampu terdapat efisiensi anggaran sebesar 1,79 %, menunjukkan efisiensi penggunaan dana pada indikator belum tercapai sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.73
Efisiensi Anggaran Sasaran 2
(Sumber Data Sekretariat)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Capaian Kinerja	Efisiensi
Meningkatnya kinerja tata kelola perangkat daerah yang akutabel	Nilai Sakip Perangkat Daerah	86,63 %	102,5 %	15,87 %

* Data Tahun 2024

3. Sasaran 3 (Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air yang berkualitas dan Berfungsi dengan Baik)

Untuk sasaran 3 terdapat efisiensi anggaran sebesar 10,98 % sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.74
Efisiensi Anggaran Sasaran 3
(Sumber Data Bidang SDA)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Capaian Kinerja	Efisiensi
Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air yang berkualitas dan Berfungsi dengan Baik	Luaslahan yang teraliri irigasi dengan baik	90,866%	98,644%	7,778%
	Persentase luasan genangan/banjir	88,011%	103,19%	15,18%

* Data Tahun 2024

4. Sasaran 4 (Meningkatnya Rumah Tangga Dengan Akses Air Mium Layak Dan Sanitasi Layak)

Untuk sasaran 4 dari 2 indikator dan 4 Program pengampu terdapat efisiensi anggaran sebesar 6,19% dan 0,44% , menunjukkan efisiensi penggunaan dana pada indikator belum tercapai sebagaimana tabel berikut

Tabel 3.75
Efisiensi Anggaran Sasaran 4
(Sumber Data Bidang CKJK)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Capaian Kinerja	Efisiensi
Meningkatnya Rumah Tangga Dengan Akses Air Mium Layak Dan Sanitasi Layak	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	93,81	100	6,19%
	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	99,56	100	0,44%

* Data Tahun 2024

5. Sasaran 5 (Meningkatnya Pemanfaatan Tanah Daerah)

Untuk sasaran 5 dari 1 indikator dan 2 Program pengampu terdapat efisiensi anggaran sebesar 23,78%, menunjukkan efisiensi penggunaan dana pada indikator belum tercapai sebagaimana tabel berikut

Tabel 3.76
Efisiensi Anggaran Sasaran 5
(Sumber Data Bidang Pertanahan)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Capaian Kinerja	Efisiensi
Meningkatnya Pemanfaatan Tanah Daerah	Persentase asset tanah yang termanfaatkan dengan baik	76,22%	100%	23,78%

* Data Tahun 2024

6. Sasaran 6 (Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung Kantor Pemerintah)

Untuk sasaran 6 dari 1 indikator dan 2 Program pengampu terdapat efisiensi anggaran sebesar 4,48 %, menunjukkan efisiensi penggunaan dana pada indikator belum tercapai sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.77
Efisiensi Anggaran Sasaran 6
(Sumber Data Bidang CKJK)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Capaian Kinerja	Efisiensi
Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung Kantor Pemerintah	Persentase bangunan gedung kantor pemerintah yang tertata dengan baik	92,12	96,60	4,48%

* Data Tahun 2024

7. Sasaran 7 (Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang)

Untuk sasaran 7 dari 1 indikator dan 1 Program pengampu terdapat efisiensi anggaran sebesar 4,97 %, menunjukkan efisiensi penggunaan dana pada indikator belum tercapai sebagaimana tabel berikut

Tabel 3.78
Efisiensi Anggaran Sasaran 7
(Sumber Data Bidang Tata Ruang)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Capaian Kinerja	Efisiensi
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	95,03	100	4,97%

* Data Tahun 2024

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 merupakan laporan pertanggungjawaban terhadap Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 - 2026 Tahun pertama.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian terhadap **7 Sasaran dengan 9 Indikator** yang sudah diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja seluruh indikator adalah 100% dengan tingkat capaian kinerja berkategori **Sangat Memuaskan**.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Upaya-upaya yang akan dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dalam rangka peningkatan kinerja sebagai berikut :

1. Terus meningkatkan komitmen Pimpinan dan seluruh Kepala Bidang Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan dalam meningkatkan penerapan SAKIP Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
2. Membangun Budaya Kerja yang merubah *mind set* Aparatur Sipil yang dulunya berorientasi kepada Anggaran berubah kepada Capaian Kinerja yang menunjang Tujuan Sasaran Kabupaten.
3. Melakukan pelelangan barang dan jasa sejak dini agar waktu pekerjaan bisa lebih cepat dan meminimalkan resiko keterlambatan pekerjaan yang mempengaruhi kinerja serta manfaat pekerjaan bisa dirasakan lebih awal.